

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM MENGATASI ABRASI  
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**Mhd.Raziq**  
**157310571**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
PEKANBARU  
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Mhd. Raziq  
Npm : 157310571  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 8 Mei 2020

Ketua Program Studi

Pembimbing



**Budi Mulianto, S.IP., M.Si**



**Rizky Setiawan, S. IP., M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Mhd. Raziq  
NPM : 157310571  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi  
Di kabupaten Kepulauan Meranti

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 5 Mei 2020

Ketua

Sekretaris

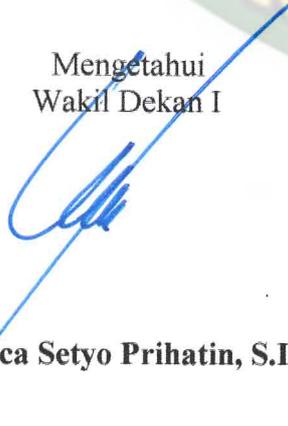
  
**Risky Setiawan, S.IP., M.Si**

  
**Silvina Rusadi, S.Sos., M.Si**

Anggota

  
**Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA**

Mengetahui  
Wakil Dekan I

  
**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

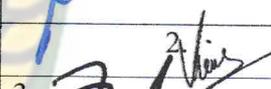
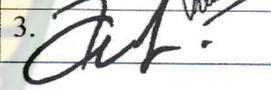
---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *108* /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 28 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 29 April 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : M. Raziq  
NPM : 157310722  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Strategi Dinas Pekerja Umum Dalam Mengatasi Abrasi Dikabupaten Kepulauan Meranti.**

Nilai Ujian : Angka : " " ; Huruf : " *4-* "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Rizky Setiawan S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi S.Sos.,M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr.Ahmad fitra yuza, S.IP, MA	Anggota	3. 

Pekanbaru, 29 April 2020  
An. Dekan,

  
**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Mhd. Raziq  
NPM : 157310571  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)  
Judul Skripsi : Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Di kabupaten Kepulauan Meranti

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Ketua

  
**Rizky Setiawan, S.Ip, M.Si**

Pekanbaru, 8 Mei 2020  
Sekretaris

  
**Silvina Kusadi, S.Sos, M.Si**

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Wakil Dekan I

  
**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
**Budi Mulianto, S.IP.,M.Si**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena hanya atas Rahmat dan Petunjuk-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti** dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, M, C. L selaku rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal L, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP, M.Si selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Rizky Setiawan, S. IP., M.Si selaku dosen pembimbing tunggal yang tak henti – hentinya dengan sabar dan telah membantu mengarahkan serta memberikan motivasi sehingga penulisan usulan penelitian dapat diselesaikan pada waktunya.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff tata usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau.
6. Buat Ayah dan Bunda tercinta syang tak henti –hentinya memberikan do'a dan selalu memberikan dukungan dan semangat dalam kondisi apapun

sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

7. Kepada rekan-rekan HIMIP Periode 2018-2019 yaitu Andika Zulkyati, Ricky Maulana, Bambang Setiyadi, Iranda Firiansyah, Elisyah Fitriani, Ririn Wandes Octavia,terimakasih yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Usulan Penelitian ini maupun dalam perkuliahan.
8. Kepada Teman seperjuangan Muhammad Riomadi, Rio Andika, Ramadhani Ikhsan, Miftah Surgana, Ramadhani terimakasih sudah memberi suport dan dukungannya selama ini.

Sehingga bimbingan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan jadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru, 8 Mei 2020

Penulis

Mhd.Raziq

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	10
1. Konsep Pemerintah .....	10
2. Konsep Pemerintah Daerah .....	15
3. Konsep Kebijakan Publik .....	17
4. Konsep Koordinasi .....	20
5. Konsep Strategi.....	26
6. Dinas Pekerjaan Umum .....	30
7. Konsep Abrasi.....	33
8. Konsep Pantai .....	35
9. Penyebab Abrasi .....	36
10. Dampak Abrasi .....	38
B. Penelitian Terdahulu .....	44
C. Kerangka Pikir .....	45
D. Konsep Operasional.....	46
E. Operasionalisasi Variabel .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	49
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Informan dan Key informan .....	50
D. Jenis dan Sumber Data .....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Analisis Data.....	53
G. Jadwal Penelitian .....	55

#### **BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Profil Kabupaten Kepulauan Meranti .....	56
1. Pembagian administratif .....	56
B. Sejarah wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti .....	57
C. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum .....	59
D. Kualitas SDM Dinas Pekerjaan Umum .....	62
E. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum .....	63
F. Uraian Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum .....	66

#### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas informan .....	72
1. Jenis Kelamin .....	72
2. Pendidikan .....	73
3. Umur .....	74
B. Hasil dan Pembahasan .....	75
1. Tujuan .....	77
a. Mencegah Penyusutan Abrasi .....	78
b. Melindungi Sumber Daya Alam .....	79
c. Menjaga Lahan dan Tempat Tinggal .....	80
2. Program .....	82
a. Membangun Turap .....	82
b. Membangun Batu Penaha Gelombang .....	84
c. Penanaman Hutan mangrove .....	85
3. Kebijakan .....	87
a. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat .....	88
b. Koordinasi Antar Sektor .....	89
c. Menyusun Perangkat Hukum efektif .....	91
C. Faktor Penghambat .....	93

#### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	96
---------------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Data Desa di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti .....	3
II.1 Penelitian Terdahulu.....	44
II. 2 Operasional Variabel.....	48
III.1 Informan Peneliti.....	50
III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	55
V.1 Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin .....	72
V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	73
V.3 Identitas Informan Berdasarkan Umur .....	74

## DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
II.2 Kerangka Pikir Penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Batang Kulim Kabupaten Pelalawan.....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Wawancara Penelitian .....	98
Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan FISIPOL UIR tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa .....	102
Lampiran 3 Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau .....	103
Lampiran 4 Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Meranti .....	104
Lampiran 5 Surat Keterangan Dari Desa Tanjung Medang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti .....	105
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	106

## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang BertandaTangan dibawah ini :

Nama : Mhd.Raziq  
Npm : 157310571  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
JenjangPendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Strategi Dinas Pekerjaan Umum dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekatnya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian korehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buatdengan penuh kesadaran dan tanpat tekanan dari pihak mana pun juga.

Pernyataan, 8 Mei 2020

Mhd.Raziq

## **STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM MENGATASI ABRASI DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

### **ABSTRAK**

**Mhd.Raziq**

Kata kunci : Strategi , Penanggulangan ,Abrasi, Dinas Pekerjaan Umum  
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Strategi Dinas Pekerjaan Umum dalam menanggulangi abrasi diKabupaten Kepulauan Meranti dan juga mendeskripsikan hambatan dalam pelaksanaannya Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan teknik analisis Deskriptif, Penulisan ini menggambarkan kondisi secara objek yang di temukan dilapangan berdasarkan data data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan Strategi Dinas Pekerjaan Umum dalam menanggulangi abrasi, dengan Wawancara dan Observasi sebagai alat pengumpulan data, dan data yang di kumpulkan kemudian disajikan sebagai bahan baku utama untuk menganalisis kondisi Empiris dan Objektifitas keberadaan dan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Terdapat 5 Kelompok menjadi objek dalam Penelitian. Penulisan Terdiri dari Data Primer yang sama di peroleh melalui alat penelitian berupa wawancara serta Observasi dan Data sekunder yang di peroleh dengan hasil wawancara sesuai dengan hasil penelitian memperoleh Kesimpulan yaitu dalam Strategi Dinas Pekerjaan Umum dalam menanggulangi abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti di Kategorikan Kurang Terlaksana dimana Belum adanya pembangunan Turap dan juga Penanaman Hutan Mangrove di pesisir pantai sebagai salah satu bentuk dalam penanggulangan Abrasi yang terjadi.

## STRATEGY OF PUBLIC WORKING SERVICES IN RESPONDING ABRATION IN THE MERANTI ISLAND DISTRICT

### ABSTRACT

Mhd.Raziq

Keywords : Strategy, Countermeasures, Abrasion, Public Works Agency

The purpose of this study is to describe the Public Works Service Strategy in tackling abrasion in the Meranti Islands District and also describe the obstacles in its implementation. This study uses a Qualitative method with Descriptive analysis techniques. This writing describes the condition of objects found in the field based on data data relating to existing problems in the Public Works Department of the Meranti Islands Regency related to the Public Works Service Strategy in tackling abrasion, with Interviews and Observation as a data collection tool, and the data collected is then presented as the main raw material for analyzing the Empirical conditions and the objectivity of the existence and purpose of research at the location in scrutiny. There are 5 groups being the object of research. Writing Consists of the same Primary Data obtained through research tools in the form of interviews and Observation and Secondary Data obtained from interviews in accordance with the results of the study obtained conclusions, namely in the Public Works Agency Strategy in tackling abrasion in the Kepulauan Meranti Regency in the category of Not Implemented where Not Yet the construction of Turap and Mangrove Forest Planting on the coast as a form of abrasion prevention.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan tentunya tidak lepas dengan garis pantai. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. yang luas wilayah perairan laut lebih dari sekitar 9.984.670 Km<sup>2</sup> dengan 17.500 pulau dan panjang garis pantai sekitar 54.716 km. Daerah pantai merupakan daerah yang spesifik, karena berada di antara dua pengaruh yaitu pengaruh daratan dan pengaruh lautan. Kawasan pantai merupakan kawasan yang sangat dinamis dengan berbagai ekosistem hidup yang saling mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain.

Namun sebanyak 20% garis pantai Indonesia mengalami kerusakan, tentunya kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu perubahan lingkungan dan abrasi pantai. Perubahan garis pantai merupakan salah satu bentuk dinamisasi kawasan pantai yang terjadi secara terus menerus. Perubahan garis pantai yang terjadi di kawasan pantai berupa pengikisan badan pantai (abrasi) dan penambahan badan pantai (sedimentasi atau akresi). Proses abrasi disebabkan oleh beberapa faktor yang secara umum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu akibat faktor alam seperti perubahan cuaca atau iklim dan akibat aktivitas manusia yang mengakibatkan hilangnya perlindungan alami pantai serta berubahnya pola aliran dan transport disepanjang pantai.

Kondisi kawasan pantai di berbagai lokasi di Indonesia sangat mengkhawatirkan yang diakibatkan oleh adanya kejadian abrasi atau erosi. Sekitar

100 lokasi di 17 Propinsi dengan panjang pantai kurang lebih 400 km telah mengalami erosi pantai yang mengkhawatirkan. Tidak terkecuali di Provinsi Riau dimana terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki garis pantai serta menjadi pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, Kabupaten Kepulauan Meranti contohnya yang sebelah utara berbatasan langsung dengan selat Malaka yang merupakan jalur lintas angkutan laut berbagai Negara.

Luas seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 5.526,17 km<sup>2</sup> terdiri dari luas daratan 3.707,84 km<sup>2</sup> dan luas lautan 1.818,33 km<sup>2</sup> yang memiliki batas wilayah administrative sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah Barat : Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis.
4. Sebelah Timur : Selat Malaka

Kabupaten Kepulauan meranti merupakan daerah yang terdiri dari wilayah pesisir, yang mana wilayah pesisir merupakan daerah yang rentan akan dampak abrasi. Abrasi berdasarkan Peraturan Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut, arus laut dan pasang surut. Yang bersifat merusak yang dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Dan laju abrasi dalam satu tahun dapat mencapai 8 meter s/d 12 meter dalam pertahun.

Terdapat banyak titik lokasi pantai yang tersebar di beberapa pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi abrasi terparah adalah pulau yang

langsung berhadapan dengan Selat Melaka yaitu Pulau Rangsang. Dapat dilihat dari dokumentasi berikut:

**Gambar 1: Zona Abrasi Di Desa Tanjung Medang**



*Sumber: Modifikasi penulis 2019*

**Tabel I.1 Data Desa Kecamatan Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Kecamatan	Desa
1.	Rangsang	1. Tanjung Samak 2. Dwi Tunggal 3. Citra Damai 4. Wonosari 5. Gemala Sari 6. Penyagun 7. Teluk Samak 8. Topang 9. Tajung Bakau 10. Tanjung Gemuk 11. Tebun 12. Tanjung Medang 13. Repan 14. Sungai Gayung Kiri

*Sumber : Modifikasi penulis 2019*

Dilihat dari tabel di atas terdapat beberapa desa yang terkena dampak abrasi antara lain: Tanjung Medang, Topang, Tanjung Bakau, Sungai Gayung Kiri, Tanjung Gemuk. Dari beberapa Desa yang terkena dampak abrasi tersebut, saya memilih titik fokus penelitian di desa Tanjung Medang, Karena di desa tersebut merupakan desa yang paling parah terkena dampak abrasi.

Penyebab abrasi yang terjadi di Tanjung Medang disebabkan karena tidak adanya tanaman bakau, selain itu juga dikarenakan kuatnya ombak yang semakin banyak mengikis lahan masyarakat. Dampak yang terjadi karena abrasi yaitu lahan masyarakat semakin menyempit, rusaknya tempat tinggal masyarakat, banyaknya terjadi kerusakan infrastruktur bangunan yang ada di garis pantai, hilangnya lahan pertanian masyarakat, dan berkurangnya penghasilan masyarakat. Abrasi tidak mungkin bisa dicegah karena setiap hari air laut terus bergerak dan anginpun tak berhenti berhembus.

Oleh karena itu, kita sebagai manusia hanya bisa mengurangi, menghambat, atau memperkecil kerusakan yang diakibatkan oleh abrasi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi (paling tidak menghambat) Seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa abrasi adalah peristiwa yang memberikan dampak buruk pada daerah pantai. Oleh karena itu upaya untuk mencegah abrasi harus segera dilakukan sebelum bertambah parah.

Adapun beberapa cara untuk pencegahan abrasi adalah sebagai berikut:

1. Penanaman hutan bakau

Karena Pohon bakau merupakan jenis pepohonan yang akarnya dapat menjulur ke dalam air pantai. Dan biasanya pohon bakau di tanam sejajar

garis pantai untuk sekaligus membatasi daerah air dengan daerah pantai yang berpasir. Akar pohon bakau yang kuat akan menahan gelombang dan arus laut yang mengarah ke pantai agar tidak menghancurkan bebatuan dan tanah di daerah pantai.

1. Memelihara Terumbu Karang

Pencegahan abrasi juga dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan terumbu karang karena seperti yang kita ketahui bahwa terumbu karang memiliki fungsi sebagai pemecah gelombang. Dengan begitu, apabila ekosistem terumbu karang diperbaiki maka akan dapat meminimalisir terjadinya abrasi.

2. Melarang Penggalian Pasir pantai.

Karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pusat yang harus tegas melarang kegiatan penambangan pasir di daerah-daerah tertentu, yaitu melalui peraturan pemerintah. Pencegahan abrasi dapat dilakukan bila persediaan pasir dilautan masih memadai sehingga gelombang air tidak menyentuh garis pantai.

3. Membangun Pengamanan Pantai

Upaya membangun pengaman pantai bertujuan untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan kerusakan daerah pantai akibat hempasan gelombang yang tinggi.

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja daerah di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini ada beberapa satuan kerja yang mempunyai kewenangan yang sama dalam penanggulangan abrasi baik bersifat binaan maupun teknis, yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Dalam pelaksanaannya, penanganan masalah abrasi pantai dan gelombang yang sangat ekstrim dapat melibatkan berbagai kepentingan, nilai serta pemahaman pola penanganannya. Untuk itu diperlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dengan melibatkan pertimbangan biaya, oprasional dan pemeliharaan, selain kerjasama, pembagian penanganan abrasi dan gelombang yang sangat ekstrim ini tadi di daerah pantai juga harus jelas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih pada masing-masing satuan kerja dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian abrasi.

Intansi pemerintah yang mempunyai tugas dalam mengatasi atau mengurangi abrasi yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 34 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti. Bagian keenam bidang perairan pasal 10 dalam mengatasi abrasi yaitu:

1. Bidang sumber daya air mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan kontruksi, oprasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai,

pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, air tanah, dan air baku urusan pemerintah daerah

2. Bidang Sumber Daya Air dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
  - b. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
  - c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air.
  - d. Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/ desain/ pengembangan sumber daya air;
  - e. Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, danau dan pantai;
  - f. Pengelolaan sistem hidrologi;
  - g. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
  - h. Pengelolaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
  - i. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin perusahaan sumber daya air;
  - j. Menyelenggarakan pemantauan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyelidikan tindak pidana bidang sumber daya air.

3. Susunana Organisasi Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari;
  - a. Seksi perencanaan sumber daya air
  - b. Seksi pebangunan sumber daya air ; dan
  - c. Seksi operasi dan pemeliharaan

Berdasarkan hasil penjelasan diatas masalah abrasi ini bukan hanya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum saja tetapi juga kerja sama oleh seksi pengelolaan sumber daya air, serta peran yang bersangkutan seperti seksi badan lingkungan hidup, Dinas kelautan dan perikanan dan Dinas perkebunan dan kehutanan. Dari penjelasan di atas penulis menemukan beberapa fenomena yang belum terjalankan dengan baik, yaitu:

1. Kurangnya Program pembangunan Batu Penahan Gelombang dan Turap serta Pelestarian Hutan Mangrove oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti di pesisir pulau Rangsang sehingga Abrasi terus terjadi dan belum dapat di selesaikan
2. Tidak adanya perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya Dinas Pekerjaan Umum dalam mengatasi abrasi.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena-fenomena yang di atas saya selaku peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana *Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti?*

### **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

#### **Tujuan kegunaan penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi masalah abrasi di Kecamatan Rangsang Khususnya di desa Tanjung Medang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang terjadi dalam mengatasi abrasi di Kecamatan Rangsang.

#### **D. Kegunaan penelitian**

- a. Memberikan masukan atau informasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dalam mengatasi abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti
- b. Sebagai bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya mengenai strategi Dinas Pekerjaan Umum dalam mengatasi abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti
- c. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan para mahasiswa di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik khususnya bagi jurusan Ilmu Pemerintahan.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, kerangka-kerangka ilmiah, tesis dan disertai peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.

Kerangka teori atau studi kepustakaan dimaksud untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan adalah teori-teori mengenai variable permasalahan yang akan diteliti (Mardalis, 2010:41)

#### 1. Pemerintahan

Kata pemerintahan berasal dari kata dasar perintah yang berarti melakukan Pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki 4 unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsur yang diperintah yaitu rakyat, unsur pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan. Setelah mendapat awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi mengurus. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan menjadi perbuatan, cara atau perihal. Syafiie dan Andi Azikin, (2008:15).

Pemerintah dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin *gubernare*, Greek *gubernon* yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan. Menurut Awang dan Mendra Wijaya (2012:6), Pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara.

Menurut Woodrow Wilson (dalam Syafiie dan Andi Azikin, 2008:9) pemerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata. Pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Ndraha (2003:6)

Menurut Napitupulu (2007:9) istilah pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintah adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu Negara. Menurut Syafiie dan Andi Azikin (dalam Rahman, 2009:2) pemerintahan adalah sekelompok orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (not to do), dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dan masyarakat, antar departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Strong mengatakan bahwa Pemerintah dalam arti luas

mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dalam keamanan Negara, kedalam dan keluar. Oleh karena itu pemerintah harus:

1. Harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang.
2. Harus mempunyai kekuatan legesltif atau dalam arti pembuatan Undang-undang.
3. Harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menjalankann peraturan, hal tersebut dalam penyelenggaraan kepentingan Negara.

Sedangkan menurut Rosenthal (dalam Syafiie, 2007:34) ilmu pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan Umum. Menurut David Apter (dalam Syafiie dan Andi Azikin, 2008:9) pemerintahan merupakan satuan anggota yang paling Umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Ndraha (2003:5) mempunyai pendapat pemerintahan adalah sebuah system multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan layanan sipil. Kemudian di dalam Al-qur'an juga dijelaskan memiliki definisi terhadap pengertian pemerintahan Yang terdapat pada surat ke 3 ayat 104 dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kebaikan,

mengajak pada kebenaran, melarang dari hal buruk, itulah yang beruntung (dalam Syafiie dan Azikin, (2008:10).

Dalam bahasa inggris, pemerintah disebut *government* (latin gubernare), Greek kybernan, artinya to steer, mengemudikan atau mengendalikan) sehingga semula, lambing pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal. Ndraha (1997:7). Selanjutnya H.A. Brasz (dalam Syafiie, 2011:6) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan Umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Mac Iver (dalam Syafiie dan Andi Azikin, 2008:8) menjelaskan ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (a science of how man are governed). Menurut U.Roesenthal (dalam Syafiie 2005:21) ilmu pemerintahan adalah yang mengetahui studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan Umum. Ndraha (2003:428) menyatakan pemerintah terlebih dahulu sebagai suatu kegiatan atau proses penyediaan dan distribusi pelayanan public yang tidak dapat diprivatisasikan dan layanan *civil* kepada setiap orang pada saat dibutuhkan, pelaku kegiatan itulah yang disebut dengan perintah. Adapun yang menjadi tugas dari pemerintah menurut Admosudirdjo (dalam Syafiie, 2011:9) antara lain adalah tata usaha Negara, rumah tangga Negara, pemerintah, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi Pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.

Sedangkan menurut Nugroho (2003:75) menjelaskan bahwa didalam masyarakat terdapat 3 jenis tugas pokok yang diperlukan agar masyarakat hidup, tumbuh dan berkembang, yaitu tugas pelayanan, tugas pembangunan dan tugas pemberdayaan.

1. Tugas pelayanan adalah tugas memberikan pelayanan kepada Umum tanpa membeda-bedakan dan diberikan secara Cuma-Cuma atau dengan dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu pun mampu menjangkaunya.
2. Tugas pembangunan adalah tugas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari masyarakat.
3. Tugas pemberdayaan adalah peran untuk membuat setiap warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan.

Makna pada konsep di atas dapat dianggap sebagai suatu konsekuensi dari pemberian wewenang atau tanggung jawab pemerintah atasan/pusat kepada pemerintah bawahan/daerah yang diikuti pula dengan sumber pembiayaan pada akhirnya disertai juga dengan pengawasan terhadap pelimpahan tanggung jawab tersebut. Pemerintah adalah yang kompleks dan berkembang setua dunia. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintah dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang.

Rasyid (dalam Labolo, 2006:22) membagi fungsi pemerintah menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan peraturan (regulation).

## 2. Pemerintah Daerah

Pemerintah dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin *gubernate*, *greek gibernen* yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan. Menurut Awang dan Mendra (2012) pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara.

Pemerintah adalah orang yang berwenang memproses pelayanan public dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah (Ndraha, 2003).

Menurut Syafiie dan Andi (dalam Rahman, 2009) pemerintahan adalah sekelompok orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*), dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dan masyarakat, antar departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Menurut David Apter (dalam Syafiie dan Andi, 2008) pemerintahan merupakan satuan anggota yang paling Umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya dan (b) monopoli

praktis mengenai kekuasaan paksaan. Ndraha (2003) mempunyai pendapat pemerintahan adalah sebuah system multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.

Adapun yang menjadi tugas dari pemerintah menurut Admosudirdjo (dalam Syafiie, 2011) antara lain adalah tata usaha Negara, rumah tangga Negara, pemerintah, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintah adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan. Rasyid (dalam Labolo, 2006) membagi fungsi pemerintah menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (*Public Service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan peraturan (*regulation*).

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dengan pembaruan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan definisi otonomi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam sistem otonomi daerah, dikenal istilah desentralisasi, dekonsentralisasi, dan tugas pembantuan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan dalam sistem NKRI. Sedangkan dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

### 3. Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris disebut policy. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl Friedric sebagaimana dikutip Leo Agustino(2015:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Lingkup dan studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari tingkatan kebijakan publik dapat bersifat fungsional, regional, maupun lokal seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan

presiden, peraturan menteri, peraturan daerah/provinsi, dan peraturan bupati/walikota.

Menurut Agustino(2015:8), ada lima karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik, yaitu:

1. Pada umumnya kebijakan publik ditunjukkan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik biasanya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang maksud dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif, secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu tindakan atau tidak mengajarkan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan yang meningkat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik tertentu, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi yang lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta untuk mencapai amanat konstitusi.

Definisi lain dikemukakan oleh Thomas R. Dye yang dikutip Solichin Abdul Wahab (2014:14) menyatakan bahwa kebijakan publik ialah pilihan tindakan ataupun yang dilakukan atau yang tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Definisi yang diusulkan Dye ini sering dikutip dan hampir dapat kita ketemui di setiap buku teks yang ditulis oleh para ahli.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan publik. Biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undang yang dibuat pemerintah yang bersifat mengikat dan memaksa.

#### 4. **Koordinasi**

Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara meningkat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa hingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain ( Dalam Ndraha 2003:219 )

Koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha mengerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil ( Dalam Inu Kencana 2011:33 )

Koordinasi termasuk di dalam tujuan Komunikasi Organisasi yaitu untuk memudahkan, melaksanakan dan melancarkan jalanya organisasi. Menurut Koontz ( Dalam Moekijat, 1993: 15-16) dalam arti yang lebih luas, tujuan komunikasi organisasi adalah untuk mengadakan perubahan dan untuk mempegaruhi tindakan kearah kesejahteraan perusahaan. Sementara itu, Liliweri ( 2013: 372-373 ) mengemukakan pendapat bahwa ada 4 tujuan komunikasi organisasi, yakni:

1. Menyatakan pikiran, pandangan dan pendapat
2. Membagi informasi
3. Menyatakan perasaan dan emosi
4. Melakukan koordinasi

Selain itu, Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada suatu-suatu yang terpisah ( departemen atau bidang-

bidang fungsional ) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi-organisasi secara keseluruhan ( T.Hani Handoko, 2003:195).

Dalam pemerintah daerah koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh kepala wilayah guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun melaksanakan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal dan antara instansi vertikal dan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna.

Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesetiaan tindakan dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Mc. Farland ( Dalam Handayani, 1985:85).

Secara normatif, koordinasi diatur sebagai kewenangan untuk mengerakkan, menyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negative spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja ( Ndraha 2003:290).

Menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul *kybernology* (2003:191). Koordinasi dapat diartikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi

yang suatu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain.

Selain itu, koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha mengerakkkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada suatu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. Menurut Leonard D.white ( Dalam Inu Kencana 2011:33).

a. Bentuk-bentuk koordinasi

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul manajemen pemerintahan (2011:35), bentuk Koordinasi adalah:

1. Kordinasi Horizotal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antara lembaga-lembaga yang sederajat.

2. Koordinasi vertikal

Koordinasi vertikal adalah penyelarasan secara harmonis dan sinkron dan lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah.

3. Koordinasi Fungsional

Koordinasi fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga-lembaga yang memiliki kesamaan dalam dalam fungsi pekerjaan.

Selain itu, menurut Handayani (1989:80), koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator.

1. Komunikasi
  - a. Ada tidaknya komunikasi
  - b. Ada tidaknya alur informasi
  - c. Ada tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran pentingnya Kooordinasi
  - a. Tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi
  - b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi partisipan
  - a. Ada tidaknya pejabat berwenang yang terlibat
  - b. Ada tidaknya ahli dibidang yang terlibat
4. Kesepakatan, komitmen dan isentif koordinasi
  - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
  - b. Ada tidaknya pelaksanaan kegiatan
  - c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
  - d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi
5. Kontinuitas perencanaan
  - a. Ada tidaknya umpan balik dari objek dan subyek
  - b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

Dalam hal ini, Koordinasi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menciptakan memelihara evektifitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan berkeseimbangan antar berbagai dependen organisasi.
2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interpenden yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsive, antisipatif dikalangan unit kerja interdependen dan idenpenden yang berbeda-beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif (2002:295).

Selain itu unsur-unsur Koordinasi menurut Inu Kencana (2002:168) adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan
2. Singkronisasi
3. Kepentingan bersama
4. Tujuan bersama

Selain itu, Koordinasi adalah inti dari operasi organisasi, yang memungkinkan tujuan organisasi tercapai. Penyelenggaraan organisasi menuntut pembagian tugas dan peran. Karena tugas dan peran tidak dapat berdiri sendiri, maka diperlukan pengaturan, dengan kata lain , berbagai aktifitas harus dikoordinasikan secara sadar.

Selain itu Menurut Hasibuan (2007) ada dua sifat Koordinasi yaitu

1. Dinamis, Bukan Statis

2. Menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang kordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran.

Sedangkan Ciri-ciri dari koordinasi ini disebutkan oleh Handayaniingrat (1985:90) sebagai berikut:

- Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan
- Adanya proses (continues process)
- Pengaturan secara teratur usaha kelompok
- Konsep kesatuan tindakan
- Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa salah satu indicator dalam koordinasi adalah Komunikasi, maka keduanya memiliki hubungan sebagai upaya memadukan (mengintegrasikan), menyalurkan dan menyelaraskan sebagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama. Selain itu, Handayaniingrat (1985) menegaskan bahwa koordinasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan, seperti halnya koordinasi dan kepemimpinan karena satu sama lain saling mempengaruhi.

Secara spesifik, Manole dan Crowstone (1999) mengartikan aktivitas koordinasi sebagai mengelola ketergantungan antar kegiatan. Pemahaman dan analisis bagaimana tentang koordinasi dapat terjadi dalam berbagai system yang berbeda dikembangkan dalam dalam teori koordinasi. Selaian itu, keefektifan system dan interaksi yang terjalin diantara unit-unit terkait, selain diukur

berdasarkan kinerja yang dicapai, juga dinilai berdasarkan pencapaian atau kemampuan untuk meningkatkan koordinasi. Koordinasi ditempatkan sebagai elemen yang sangat penting bagi keefektifan operasi atau proses yang dijalankan perusahaan. Keefektifan koordinasi dinilai sebagai factor yang mempengaruhi kerjaperusahaan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hakikat koordinasi adalah perwujudan dari sebuah kerja sama, saling menghargai atau menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab karena adanya prinsip pembagian habis tugas, fungsional dan akibat adanya rentang atau jenjang pengendalian, dimana pimpinan wajib membina, membimbing, mengarahkan dan mengendalikan berbagai kegiatan/usaha dalam suatu organisasi yang besar dan kompleks, dimana berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai satuan kerja unit yang harus dilakukan secara terpadu.

## **5. Strategi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Penyusunan sebuah strategi harus menggunakan metode maupun teknik-teknik tertentu. Sehingga kebijaksanaan yang dihasilkan akan optimal. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan keahlian yang memadai guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Strickland (J. Winardi, 2003:106), strategi dalam suatu organisasi adalah tindakan-tindakan dan pendekatan-pendekatan organisasi yang diterapkan oleh pihak pimpinan guna mencapai kinerja keorganisasian yang telah

ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini secara tipikal strategi merupakan sebuah bauran yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan secara sadar dan yang ditujukan pada sasaran-sasaran tertentu serta tindakan-tindakan yang diperlukan guna menghadapi perkembangan-perkembangan yang tidak diantisipasi, dan arena tekanan-tekanan yang bersifat kompetitif yang dilancarkan. Definisi di atas menekankan bahwa strategi sebagai tindakan keorganisasian yang diterapkan pimpinan organisasi secara disengaja, terencana dan diarah untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Jones (J. Winardi, 2003:106), strategi merupakan suatu kelompok keputusan, tentang tujuan apa yang akan diupayakan pencapaiannya, tindakan-tindakan yang diperlukan, dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya guna mencapai tujuan tersebut.

Definisi diatas menekankan bahwa strategi sebagai kelompok keputusan yang diambil oleh pimpinan organisasi dan diterapkan dalam berbagai upaya dan tindakandengan memanfaatkan sumber-sumber daya guna untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Onong Uchjana Effendy (2001:32), strategi adalah perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan taktik operasionalnya. Sedangkan menurut Ahmad S. Adnanputra (1997:106), strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (*plan*), di mana rencana merupakan

produk dari perencanaan (*plan ning*) yang pada akhirnya perencanaan adalah fungsi dasar dari proses manajemen

Menurut Siswanto (2002:14) Strategi adalah upaya yang di disiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi, apa yang dikerjakan organisasi dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu.

Definisi diatas menekankan bahwa strategi sebagai perencanaan dan manajemen yang berfungsi menunjukkan arah dan taktik operasional perencanaan untuk dilaksanakan oleh pimpinan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Sedangkan Menurut J. Winardi (2003:112) Strategi merupakan suatu rencana atau sejenis arah rangkaian dan tindakan-tindakan tertentu di dalam suatu organisasi yang merupakan pedoman atau kelompok untuk menghadapi suatu situasi tertentu. Sebagai sebuah rencana, Strategi memiliki dua karakteristik esensial, dalam bentuk dokumen yang dikenal sebagai suatu rencana tetapi adakalanya strategi tidak dinyatakan secara formal, meskipun hal tersebut sudah tercantum dalam fikiran bagi orang yang memiliki kepentingan.

Berdasarkan beberapa definisi maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan strategi dalam penelitian ini adalah sebuah rencana atau arah tindakan tertentu yang digunakan suatu organisasi sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas kinerja. Strategi dalam hal ini dapat dinyatakan secara eksplisit berupa dokumen dan dilaksanakan secara sadar oleh pimpinan organisasi untuk tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dimensi menurut J. Winardi (2003: 113-114), yaitu berupa berbagai dimensi yang terdapat dalam strategi organisasi sebagai berikut:

### 1. Tujuan

Tujuan atau sasaran yang paling penting dan perlu di capai dalam suatu organisasi, serta tujuan dan sasaran yang menyatakan apa saja yang perlu dicapai dalam suatu organisasi dan kapan hasil-hasil harus dilaksanakan. Dari tujuan dan sasaran nilai, menyatakan ke arah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang menetapkan sifat organisasi, dan menetapkan target bagi setiap kesatuan keorganisasian.

### 2. Program

Tahapan pelaksanaan program yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam batasan yang digariskan. Program-program menspesifikasikan langkah demi langkah tahapan-tahapan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan utama. Mereka menyatakan bagaimana sasaran-sasaran dari tujuan utama akan tercapai di dalam batas-batas oleh kebijakan. Mereka juga menyatakan bahwa sumber-sumber daya diarahkan ke arah pencapaian tujuan dan dengan apa kemajuan program dapat diukur.

### 3. Kebijakan

Dalam kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan merupakan peraturan atau prosedur yang menggariskan batas-batas didalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-

peraturan demikian seringkali mencapai keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran spesifik.

## 6. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan:

- 1) Merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
- 2) Menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan
- 3) Melaksanakan rumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan Umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Bupati
- 4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang
- 5) Melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang akibat bencana alam
- 6) Melakukan pengujian, pengembangan, pengembangan pengelolaan peralatan dan perbekalan
- 7) Melaksanakan pengembangan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu konstruksi
- 8) Merencanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan pemukiman dan kawasan perumahan
- 9) Menyiapkan tata ruang, menetapkan standar pemukiman dan kawasan
- 10) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pembangunan gedung

- 11) Melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan di bidang perumahan dan pemukiman
- 12) Menyusun dan menetapkan kawasan jaringan penyediaan air bersih dan drainase
- 13) Memberi rekomendasi pembangunan gedung baru dan izin untuk mengubah atau membongkar bangunan-bangunan yang bersejarah serta mengadakan perubahan dan pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak layak huni
- 14) Melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam di bidang perkotaan, perumahan dan permukiman
- 15) Melaksanakan penanggulangan, perbaikan sarana dan prasarana pemukiman dan jaringan air bersih beserta bangunan pelengkapanya
- 16) Melaksanakan oprasi dan pemeliharaan dan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkapanya.

Dalam mengatasi abrasi, Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas menangani masalah abrasi yaitu bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Badan Pengelola Sumber Daya Air atau disingkat BPSDA adalah balai yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air dan penyelenggaraan operasional konservasi/pelestarian air dan sumber air, serta penyelenggaraan pelatihan teknis sumber daya air. Balai ini bertanggungjawab kepada Pemerintahan sesuai dengan tingkatannya (Provinsi, Kabupaten, atau Kota) dan berada di dalam Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

BPSDA memiliki beberapa tugas, di antaranya;

- 1) Penyusunan program Balai
- 2) Pelaksanaan ketatausahaan
- 3) Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan irigasi lintas Kabupaten/Kota dan luasan 1000 - 3000 ha
- 4) Pelaksanaan penyediaan air baku untuk berbagai kepentingan
- 5) Pelaksanaan pengaturan sungai, embung dan waduk
- 6) Pelaksanaan upaya pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan
- 7) Pelaksanaan pemantauan upaya perlindungan pantai, muara, delta
- 8) Pelaksanaan pengelolaan hidrokimatologi
- 9) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya

Dalam mengatasi abrasi Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengamanan pantai Berdasarkan Permen PU No.09 Tahun 2010 menyatakan bahwa pengamanan pantai adalah upaya melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi dan akresi. Dalam penanganan abrasi yang terjadi di desa Tanjung Medang, Dinas Pekerjaan Umum bidang Pengelolaan Sumber Daya Air berwenang memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi ancaman abrasi. Pengamanan pantai yang dimaksudkan untuk melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap :

- 1) Masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai dari ancaman gelombang dan genangan pasang tinggi (rob), erosi serta abrasi.

- 2) Fasilitas Umum, fasilitas sosial, kawasan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan nilai sejarah serta nilai strategis nasional yang berada di sepanjang pantai
- 3) Perairan pantai dari pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah perkotaan, limbah insudtri dan limbah-limbah lainnya.
- 4) Pendangkalan pantai

Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum bidang pengelolaan sumber daya air yaitu meliputi:

1. Studi kelayakan pengamanan pantai

Studi kelayakan dimaksudkan untuk mengevaluasi kelayakan pengamanan pantai berdasarkan :

- 1) Kelayakan ekonomi, sosial dan lingkungan
- 2) Kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan
- 3) Keterpaduan antarsektor
- 4) Kesiapan pembiayaan
- 5) Kesiapan kelembagaan
- 6) Penyusunan program pengamanan pantai

Mengacu pada studi kelayakan pengamanan pantai seseua dengan rencanaa pengelolaan.

## **7. Abrasi Pantai**

### **a. Abrasi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 abrasi adalah proses pengikisan pantai karena tingginya tenaga gelombang laut, arus laut, dan pasang

surut. Yang bersifat merusak yang, dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Air laut tidak pernah diam. Air laut bergelombang di permukaannya, kadang-kadang besar kadang-kadang kecil, tergantung pada kecepatan angin dan kedalaman dasar lautnya. Semakin dalam dasar lautnya maka semakin besar gelombangnya. Gelombang mempunyai kemampuan untuk mengikis pantai. Akibat pengikisan ini banyak pantai yang menjadi curam dan terjal.

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Abrasi pantai diakibatkan oleh dua faktor utama yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu:

- 1) Peningkatan permukaan air laut yang diakibatkan oleh mencairnya es di daerah kutub sebagai akibat pemanasan global.
- 2) Hilangnya vegetasi mangrove (hutan bakau) di pesisir pantai. Sebagaimana diketahui, akar-akar mangrove yang ditanam di pinggiran pantai mampu menahan ombak sehingga menghambat terjadinya pengikisan pantai. Sayangnya, hutan bakau ini banyak yang telah dirusak oleh manusia melalui proses penebangan. Kerapatan pohon yang rendah pada pesisir pantai memperbesar peluang terjadinya abrasi.
- 3) Penambangan pasir sangat berperan banyak terhadap abrasi pantai, baik di daerah tempat penambangan pasir maupun di daerah sekitarnya karena

terkurasnya pasir laut akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan arah arus laut yang menghantam pantai

- 4) Perusakan karang pantai juga merupakan salah satu penyebabnya karena penggalian karang menyebabkan penambahan kedalaman perairan dangkal yang semula berfungsi meredam energi gelombang, akibatnya gelombang sampai ke pantai dengan energi yang cukup besar.
- 5) Pendirian bangunan yang melewati garis pantai sehingga pasir atau tanah di sekitar pantai menjadi tidak kuat.

Selain itu dapat juga diakibatkan oleh faktor alam, seperti :

- 1) Angin yang bertiup di atas lautan yang menimbulkan gelombang dan arus laut sehingga mempunyai kekuatan untuk mengikis daerah pantai. Gelombang yang tiba di pantai dapat menggetarkan tanah atau batuan yang lama kelamaan akan terlepas dari daratan.
- 2) Selain itu, tsunami juga merupakan salah satu faktor. Rusaknya bibir pantai di perairan Indonesia akibat abrasi itu tidak terlepas dari geologi, kekuatan ombak laut serta pusaran angin.
- 3) Proses fragmentasi sedimen juga merupakan penyebab abrasi karena butiran pasir atau sedimen kasar lambat laun akan mengalami proses fragmentasi menjadi butiran halus yang lebih mudah terbawa oleh arus dan ombak.

## 8. Pantai

Berdasarkan Permen PU No.09 Tahun 2010 menyatakan pantai adalah daerah yang merupakan pertemuan antara laut dan daratan diukur pada saat pasang tertinggi dan surut terendah. Pantai merupakan interaksi yang dinamis

antara air, angin, dan material tanah. Air dan angin bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, mengikis tanah dan kemudian mengendapkannya sehingga terjadi perubahan garis pantai. Proses perubahan pantai merupakan proses yang dinamis, dan apabila hal ini berlanjut akan mengganggu aktivitas di sekitar pantai, karena akan terjadi abrasi pada kawasan pantai tersebut. Menurut Kakisina (2004) perilaku pantai pada Umumnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe:

1) Pantai yang tererosi

Erosi pantai berupa kemunduran garis pantai ke arah darat, yang dapat merusak kawasan permukiman dan prasarana kota. Erosi pantai bisa terjadi secara alami karena serangan gelombang atau karena adanya kegiatan manusia berupa penabangan hutan bakau, pengambilan karang pantai, pembangunan pelabuhan, reklamasi pantai dan lain-lain.

2) Pantai yang stabil

Pantai yang stabil pada dasarnya sama dengan pantai yang stabil adalah konstan. Hal ini berarti meskipun volume profil berfluktuasi, namun secara keseluruhan volumenya tidak berubah terhadap waktu.

3) Pantai yang akresi

Meanisme pantai yang akresi juga sama dengan pantai yang erosi maupun stabil, hanya garis pantainya bergerak ke arah laut. Hal ini berarti fluktuasi volume profil tersebut bertambah terhadap waktu.

## 9. Penyebab Abrasi

Ada 2 (dua) faktor penyebab terjadinya abrasi yaitu faktor alam dan faktor manusia, yang disebabkan oleh faktor manusia diantaranya yaitu:

- 1) Tidak seimbangnya ekosistem laut akibat eksploitasi besar-besaran terhadap kekayaan sumber daya laut.
- 2) Hilangnya vegetasi mangrove (hutan bakau) di pesisir pantai. Sebagaimana diketahui, akar-akar mangrove yang ditanam di pinggiran pantai mampu menahan ombak sehingga menghambat terjadinya pengikisan pantai. Sayangnya, hutan bakau ini banyak yang telah dirusak oleh manusia melalui proses penebangan. Kerapatan pohon yang rendah pada pesisir pantai memperbesar peluang terjadinya abrasi.
- 3) Penambangan pasir sangat berperan banyak terhadap abrasi pantai, baik di daerah tempat penambangan pasir maupun di daerah sekitarnya karena terkurasnya pasir laut akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan arah arus laut yang menghantam pantai
- 4) Perusakan karang pantai juga merupakan salah satu penyebabnya karena penggalian karang menyebabkan pertambahan kedalaman perairan dangkal yang semula berfungsi meredam energi gelombang, akibatnya gelombang sampai ke pantai dengan energi yang cukup besar.
- 5) Pendirian bangunan yang melewati garis pantai sehingga pasir atau tanah di sekitar pantai menjadi tidak kuat.

Selain itu dapat juga disebabkan oleh faktor alam, seperti :

- 1) Angin yang bertiup di atas lautan yang menimbulkan gelombang dan arus laut sehingga mempunyai kekuatan untuk mengikis daerah pantai. Gelombang yang tiba di pantai dapat menggetarkan tanah atau batuan yang lama kelamaan akan terlepas dari daratan.

- 2) Selain itu, tsunami juga merupakan salah satu faktor. Rusaknya bibir pantai di perairan Indonesia akibat abrasi itu tidak terlepas dari geologi, kekuatan ombak laut serta pusaran angin.
- 3) Proses fragmentasi sedimen juga merupakan penyebab abrasi karena butiran pasir atau sedimen kasar lambat laun akan mengalami proses fragmentasi menjadi butiran halus yang lebih mudah terbawa oleh arus dan ombak.

#### **10. Dampak Abrasi**

Menurut Muhammad Arsyad (2012) menyatakan: “abrasi tentu sangat berdampak terhadap kehidupan. Pada Umumnya abrasi lebih banyak memiliki dampak negatif dibandingkan dampak positif. Dampak negatif yang dihasilkan dari abrasi juga sangat merugikan lingkungan khususnya manusia. Berikut ini akan dipaparkan bukti-bukti kerugian yang diakibatkan abrasi:

- 1) Air laut tidak pernah diam. Air laut bergelombang di permukaannya, kadang-kadang besar kadang-kadang kecil, tergantung pada kecepatan angin dan kedalaman dasar lautnya. Semakin dalam dasar lautnya makin besar gelombangnya. Gelombang mempunyai kemampuan untuk mengikis pantai. Akibat pengikisan ini banyak pantai yang menjadi curam dan terjal.
- 2) Penyusutan lebar pantai sehingga menyempitnya lahan bagi penduduk yang tinggal di pinggir pantai.
- 3) Kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai karena terpaan ombak yang didorong angin kencang begitu besar.
- 4) Kehilangan tempat berkumpulnya ikan-ikan perairan pantai karena terkikisnya hutan bakau.

- 5) Pemukiman penduduk yang berada di areal pantai akan kehilangan tempat tinggalnya akibat rumah mereka terkena dampak dari abrasi.
- 6) Kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan luas Pulau-Pulau di Indonesia banyak yang akan berkurang dan banyak Pulau yang akan tenggelam.
- 7) Dalam beberapa tahun terakhir garis pantai di beberapa daerah di Indonesia mengalami penyempitan yang cukup memprihatinkan. Di beberapa daerah abrasi pantai dinilai belum pada kondisi yang membahayakan keselamatan warga setempat, namun bila hal itu dibiarkan berlangsung, dikhawatirkan dapat menghambat pengembangan potensi kelautan di daerah tersebut secara keseluruhan, baik pengembangan hasil produksi perikanan maupun pemanfaatan sumber daya kelautan lainnya.
- 8) Pantai yang indah dan menjadi tujuan wisata menjadi rusak. Pemukiman warga dan tambak tergerus hingga menjadi laut. Tidak sedikit warga di pesisir pantai yang telah direlokasi gara-gara abrasi pantai.

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa abrasi sangat berdampak terhadap kehidupan. Dibandingkan dengan dampak positif, abrasi lebih banyak dampak negatif yang mana dampak negatif ini sangat merugikan manusia, lingkungan, dan aktivitas manusia itu sendiri. Tidak hanya itu, wilayah negara Indonesia juga semakin menyempit.

### **11. Upaya Mengurangi Kerusakan Yang Ditimbulkan Abrasi**

Abrasi tidak mungkin bisa dicegah karena setiap hari air laut terus bergerak dan anginpun tak berhenti berhembus. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hanya bisa mengurangi, menghambat, atau memperkecil kerusakan yang

diakibatkan oleh abrasi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi (paling tidak menghambat) masalah abrasi pantai ini menurut Islahudin (2012), yaitu:

- 1) Untuk mengatasi masalah abrasi di Pamekasan seperti yang dipaparkan sebelumnya, Sekjen DKP menempatkan Kabupaten Pamekasan sebagai tempat pelaksanaan jambore mitigasi mangrove. Beliau berharap dengan adanya jambore mitigasi mangrove yang digelar di Pamekasan ini masyarakat bisa lebih peduli untuk menjaga kelestarian lingkungan. Mereka juga berharap agar kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini saja, akan tetapi bisa tetap berkelanjutan sehingga tanaman mangrove di pesisir pantai di Pamekasan ini bisa terjaga dengan baik.
- 2) Pemulihan hutan mangrove di sekitar pantai yang terkena dampak abrasi tersebut. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya rehabilitasi untuk memperbaiki tanaman mangrove yang rusak tersebut. Pada 2004 dan 2005 pemerintah mampu menghijaukan 34.601 hektar hutan mangrove (bakau), sedangkan pada tahun 2006 sekitar 2.790 hektar.
- 3) Pelestarian terumbu karang, yaitu melalui rehabilitasi lingkungan pesisir yang hutan bakaunya sudah punah, baik akibat dari abrasi itu sendiri maupun dari pembukaan lahan tambak. Terumbu karang juga dapat berfungsi mengurangi kekuatan gelombang yang sampai ke pantai. Oleh karena itu, perlu pelestarian terumbu karang dengan membuat peraturan untuk melindungi habitatnya.
- 4) Pelarangan penggalian pasir pantai. Perlu peraturan baik di tingkat pemerintah daerah maupun pusat yang mengatur pelarangan penggalian pasir

pantai secara besar-besaran yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

- 5) Usaha membangun pengaman pantai. Pengaman pantai bertujuan untuk mencegah erosi pantai dan penggenangan daerah pantai akibat hempasan gelombang (overtopping). Berdasarkan strukturnya pengaman pantai dibedakan menjadi dua, yaitu pengamanan lunak (soft protection) dan pengamanan keras (hard protection).
- 6) Pengamanan lunak dilakukan dengan tiga cara yaitu:
  - a) Pengisian pasir, pengisian pasir bertujuan untuk mengganti pasir yang hilang akibat erosi dan memberikan perlindungan pantai terhadap erosi dalam bentuk sistem tanggul pasir. Hal yang harus diperhatikan adalah lokasi pasir harus memiliki kedalaman yang cukup sehingga penambahan kedalaman akibat penggalian pasir tidak mempengaruhi pola gelombang dan arus yang pada gilirannya akan mengakibatkan erosi ke pantai-pantai sekitarnya.
  - b) Terumbu karang, merupakan bentukan yang terdiri dari tumpukan zat kapur. Bentukan terumbu karang dibangun oleh hewan karang dan hewan-hewan serta tumbuhan lainnya yang mengandung zat kapur melalui proses biologis dan geologis dalam kurun waktu yang relatif lama. Fungsi terumbu karang selain sebagai bagian ekologis dari ekosistem pantai yang sangat kaya dengan produksi perikanan juga melindungi pantai dan ekosistem perairan dangkal lain dari hempasan ombak dan arus yang mengancam terjadinya erosi.

c) Hutan bakau (mangrove forest), merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur. Fungsi dari hutan bakau selain sebagai tempat wisata dan penghasil kayu adalah sebagai peredam gelombang dan angin badai, pelindung erosi, penahan lumpur dan penangkap sedimen. Sebenarnya telah banyak orang yang mengetahui fungsi dan kegunaan hutan bakau bagi lingkungan. Namun, dalam prakteknya di lapangan masih banyak pula yang belum memanfaatkan hutan bakau sebagai sarana untuk mencegah atau mengatasi abrasi. Padahal, mangrove yang ditanam di pinggiran pantai, akar-akarnya mampu menahan ombak sehingga menghambat terjadinya pengikisan pantai.

- 7) Pengamanan keras dilakukan dengan 5 cara, yaitu:
- a) Revetment (pelindung tebing pantai), stuktur pelindung pantai yang dibuat sejajar pantai dan biasanya memiliki permukaan miring. Strukturnya biasa terdiri dari beton, timbunan batu, karung pasir, dan beronjong (gabion). Karena permukaannya terdiri dari timbunan batu atau blok beton dengan rongga-rongga diantaranya, maka revetment lebih efektif untuk meredam energi gelombang. Bangunannya dibuat untuk menjaga stabilitas tebing atau lereng yang disebabkan oleh arus atau gelombang. Ada beberapa tipe dari revetment, seperti: Rip-rap (batuan yang dicetak dan berbentuk seragam), Unit armour (beton), dan batu alam (blok beton).

- b) Seawall (dinding), hampir serupa dengan revetment, yaitu dibuat sejajar pantai tapi seawall memiliki dinding relatif tegak atau lengkung. Seawall pada Umumnya dibuat dari konstruksi padat seperti beton, turap baja atau kayu, pasangan batu atau pipa beton sehingga seawall tidak meredam energi gelombang, tetapi gelombang yang memukul permukaan seawall akan dipantulkan kembali dan menyebabkan gerusan pada bagian tumitnya.
- c) Groin (*groyne*), struktur pengaman pantai yang dibangun menjorok relatif tegak lurus terhadap arah pantai. Bahan konstruksinya Umumnya kayu, baja, beton (pipa beton), dan batu.
- d) Pemecah Gelombang Sejajar Pantai, dibuat terpisah ke arah lepas pantai, tetapi masih di dalam zona gelombang pecah (*breaking zone*). Bagian sisi luar pemecah gelombang memberikan perlindungan dengan meredam energi gelombang sehingga gelombang dan arus di belakangnya dapat dikurangi. Pantai di belakang struktur akan stabil dengan terbentuknya endapan sedimen. Pencegahan abrasi dengan membangun pemecah gelombang buatan di sekitar pantai dengan maksud untuk mengurangi abrasi yang terjadi tanpa dibarengi dengan usaha konservasi ekosistem pantai (seperti penanaman bakau dan/atau konservasi terumbu karang).

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah.

**Tabel II. 1 : Penelitian Terdahulu**

No.	Nama penelitian	Tahun penelitian	Judul penelitian	Penjelasan
1.	Muhamad Yusuf Badjido	2015	Strategi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bantaeng	Perbedaannya adalah lokasi yang diteliti berbeda
2	Kurnia Efina	2017	Kebijakan Pemerintah Natuna terhadap pencegahan abrasi pantai di Pulau Midai Tahun 2017	Teori yang digunakan peneliti ini berbeda dengan penelitian saya
3	Rahmad Hidayat	2012	Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan abrasi	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian saya juga menggunakan metode kualitatif

Dari jurnal Muhamad Yusuf Badjido Tahun 2015 dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bantaeng”. Dari jurnal tersebut dapat menghasilkan kesimpulan bahwa Strategi yang digunakan untuk penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bantaeng yaitu dengan cara membangun waduk, menyiapkan sarana dan prasarana, melakukan penghujauan, membangun dinding pesisir pantai, dan membangun kesadaran masyarakat.

Lalu dari jurnal Kurnia Efina tahun 2017, Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan judul “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Natuna Terhadap Pencegahan Abrasi di Pantai Pulau Midai Tahun 2017”. Dari jurnal tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa abrasi yang terjadi di pantai pulau midai disebabkan oleh arus pasang surut dan gelombang pasang surut dan gelombang pasang laut saat musim utara yang arahnya hampir tegak lurus menuju daratan.

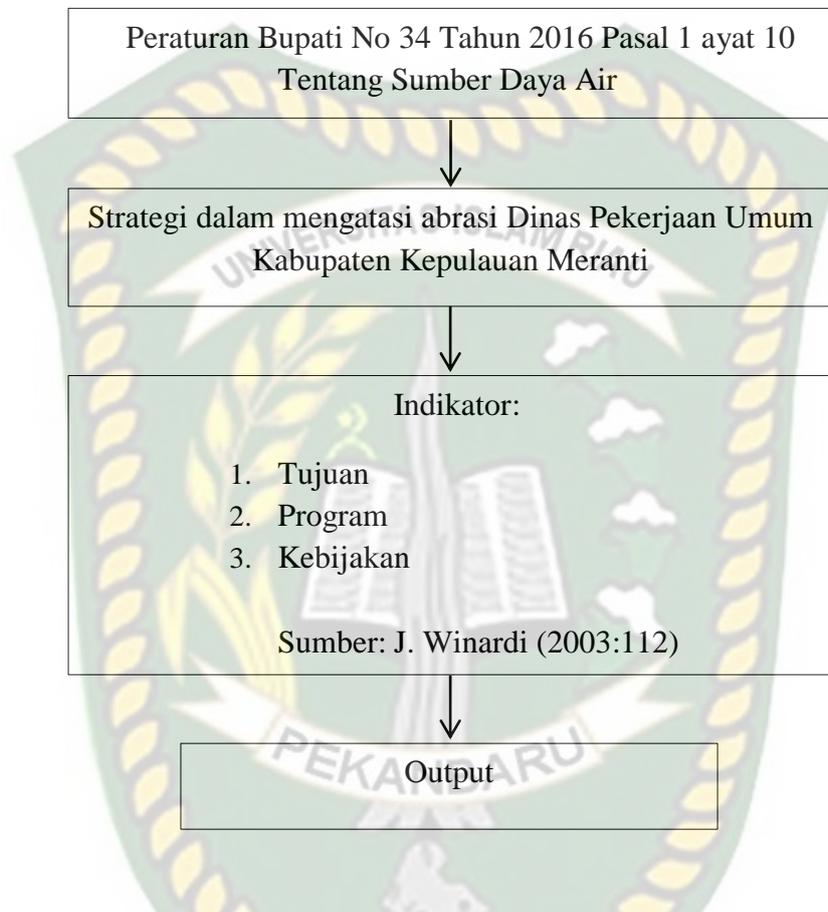
Jurnal Rahmat Hidayat Tahun 2014, mahasiswa Universitas Riau dengan judul “Upaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Penanggulangan Abrasi (Studi Pada Pesisir Pantai Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2012)”. Menghasilkan kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bengkalis berhasil dilakukan seperti kegiatan pembangunan turap dan batu pemecah gelombang, namun belum maksimal di semua titik dikarenakan beberapa kendala seperti lemahnya koordinasi pada lembaga atau instansi yang terkait.

### **C. Kerangka Pikiran**

Adanya abrasi berakibat pada kondisi wilayah pantai di Desa Tanjung Medang mengalami kerusakan. Penelitian ini mencoba mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bagian Pengelolaan Sumber Daya Air dalam mengatasi ancaman abrasi yang terjadi.

Berikut merupakan kerangka pemikiran rencana penelitian dengan alur pada gambar 1.

**Gambar 2 Kerangka Pikiran Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti.**



#### **D. Konsep Oprasional**

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama.

2. Dinas Pekerjaan Umum adalah lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum.
3. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.
4. Tujuan adalah bagian dari fungsi planing atau perencanaan dan merupakan langkah awal untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai dalam menjalankan kegiatan sebagai imdikator dalam mencapai keberhasilan.
5. Program adalah himpunan atau kumpulan intruksi tertulis yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian executable dari suatu software.
6. Kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.

#### **E. Oprasional Variabel**

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang

sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.

**Tabel II.1 Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Winardi (2003:112) Strategi merupakan suatu rencana atau sejenis arah rangkaian tindakan-tindakan tertentu di dalam suatu organisasi yang merupakan pedoman atau kelompok untuk menghadapi suatu situasi tertentu.	Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti	1. Tujuan  2. Program  1. kebijakan	a. mencegah penyusutan pelebaran pantai b. melindungi sumber daya alam c. menjaga lahan dan tempat tinggal masyarakat sekitar pantai  a. membangun Turap b. membangun batu penahan gelombang c. penanaman hutan Mangrove  a. Meningkatkan pemahaman masyarakat b. Meningkatkan koordinasi antar sektor c. Menyusun perangkat hukum yang efektif

*Sumber : modifikasi penulis, 2019*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Menurut Arikunto (2010), metode penelitian merupakan cara yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Menurut Sugiyono (2009), metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dengan demikian metode penelitian yakni suatu cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam melaksanakan suatu penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu gejala yang ada, yaitu berdasarkan keadaan yang sebenarnya pada saat dilakukan penelitian (Arikunto, 2013). Penelitian kualitatif adalah subjek penelitian yang untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Meleong, 2010). Jadi penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Hasil dari penelitian akan menggambarkan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengelolaan Sumber Daya air dalam mengatasi ancaman abrasi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan struktur tanah yang ada.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini secara khusus dilakukan di Desa Tanjung Medang yang mana Desa Tanjung Medang merupakan kondisi wilayah terparah yang mengalami dampak abrasi pantai di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu penelitian dilakukan dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas Pekerjaan Umum) Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pemerintah Kabupaten yang menangani masalah abrasi pantai di desa Tanjung Medang.

## **C. Key informen dan Informen**

### **a. Key informen**

Key informen adalah orang yang mengetahui dan memiliki informasi utama yang penulis butuhkan (Hendarso dan Suryanto, 2005:171-172). Adapun key informen dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **b. Informan**

Informan adalah orang yang terlibat dalam suatu pokok pembahasan yang diteliti (Hendarso dan Suryanto, 2005:171-172). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Sumber Daya Air, Kepala Pembangunan Sumber Daya Air, Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan, dan Masyarakat sekitar wilayah pesisir pantai.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan 2 (Dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat sekitar pantai yang mengalami abrasi dan Pegawai di Dinas Pekerjaan

Umum bagian Pengelolaan Sumber Daya Air. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumen tentang penanganan abrasi pantai berdasarkan type abrasi dan struktur tanahnya.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh yang bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat dibentuk oleh opini informan secara individual atau kelompok. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mendalam dengan kepala desa Tanjung Medang dan masyarakat Tanjung Medang yang berada disekitar daerah abrasi pantai.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (hasil dari pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder biasanya bebentuk catatan, atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen dan study literatur tentang penanganan abrasi berdasarkan type abrasi dan struktur tanahnya. Data sekunder diperoleh dari observasi dan dokumentasi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam peelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Pada

penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data digunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Meleong, 2010). Wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara semiterstruktur. Sugiyono (2012) Wawancara semiterstruktur adalah jenis wawancara dalam kategori in-dept interview. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara dari jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan nara sumber.

#### 2. Observasi

Menurut Sugiyono (2015) observasi merupakan kegiatan penelitian terhadap suatu objek jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non-partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini berkenaan dengan kebijakan atau strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam mencegah abrasi pantai di desa Tanjung Medang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### **E. Teknik Pengambilan Sampel (Nara Sumber)**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan nara sumber. Teknik pengambilan sampel atau nara sumber yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut Arikunto (2010) teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang sudah diketahui karakteristik atau ciri-cirinya oleh peneliti. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dari sampel atau nara sumber antara lain :

- 1) Orang yang terlibat dalam perencanaan dan pembangunan irigasi, sungai dan pantai dan memiliki informasi serta pengetahuan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Kepulauan Meranti
- 2) Kepala Desa Tanjung Medang dan jajarannya
- 3) Masyarakat Desa Tanjung Medang yang berada disekitaran pantai

#### **F. Teknis Analisis Data**

Analisis data disusun untuk mendapatkan gambaran strategi yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam mengatasi abrasi pantai. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Meleong (2010) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada paparan kalimat, sehinggalebih mampu memahami kondisi psikolog manusia yang kompleks yang tidak cukup apabila hanya diukur menggunakan skala saja.

Analisis data dalam penelitian dilakukan secara interaktif. Menurut Sugiyono (2012) bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai. Maksudnya, dalam analisis data peneliti ikut terlibat langsung dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan. Analisis data model interaktif terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasannya:

**1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi yaitu kesamaan data dari narasumber.

**2. Penyajian Data**

Data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

**3. Penarikan Kesimpulan**

Tahap terakhir yang berisikan proses pengambilan keputusan yang menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan saat wawancara sesuai dengan tujuan penelitian..

### G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Skripsi ini direncanakan selama 7 bulan terhitung dari bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel III. 2: Jadwal Penelitian Tentang Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Tahun 2019)									
		Bulan									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Bimbingan Usulan Penelitian										
2	Seminar Usulan Penelitian										
3	Revisi Usulan Penelitian										
4	Pengumpulan Data di Lapangan										
5	Pengolahan dan Analisis Data										
6	Penulisan dan Sidang Skripsi										

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Profil Kabupaten Meranti

Kabupaten kepulauan Meranti secara geografis kabupaten kepulauan meranti berada pada koordinat antara sekitar 0,42'30"-1,28'0"LU, dan 102'12'0"-103'10'0"BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatra, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah Negara tetangga dan masuk dalam daerah segi tiga pertumbuhan ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia-Malaysia-Singapor (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah *Hinterland kawasan free Trade Zone (FTZ) Batam – TJ. Balai karimun*. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai *gerbang lintas batas Negara/ pintu Gerbang Internasional* yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan Negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota *pusat kegiatan Strategis* Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan Negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri.

Luas kabupaten kepulauan Meranti adalah : 3707,84 km, sedangkan luas kota selat panjang adalah 849,50 km.40

#### 1. Pembagian Administratif

Secara administratif, kabupaten kepulauan Meranti terdiri dari 7 kecamatan dan 78 desa/kelurahan, adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Tebing Tinggi, ibu kota Selat panjang memiliki luas kecamatan 849,50 dengan jumlah desa/kelurahan 9 desa penduduknya 76.763 Jiwa.
2. Kecamatan Tibing Tinggi Barat, ibu kota Alai memiliki luas kecamatan 586,83 dengan jumlah desa/kelurahan 11 desa penduduknya 15.126 Jiwa.
3. Rangsang, ibu kota Tanjung Samak memiliki luas kecamatan 681,00 dengan jumlah desa/kelurahan 14 desa penduduknya 28.106
4. Rangsang Barat, ibu kota Bantar memiliki luas kecamatan 241,60 dengan jumlah desa 16 desa penduduknya 29.770.
5. Merbau, ibu kota teluk Belitung memiliki luas kecamatan 1.348,91 dengan jumlah desa/kelurahan 14 desa penduduknya 47.370.
6. Pulau Merbau, ibu kota Renak dungun memiliki desa 7 desa .
7. Tebing tinggi timur, ibu kota sungai tohor memilki desa 7 desa.

### **B. Sejarah Kabupaten Meranti**

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten termuda di provinsi Riau. Indonesia, dengan ibukotanya Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 kecamatan, yaitu kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Pulau Merbau, Merbau, Tasik Putri Puyu dan Tebing Tinggi Timur. Ada pun nama Meranti diambil dari nama gabungan” pulau merbau” pulau rangsang dan pulau tebing tinggi. Pembentukan kabupaten meranti merupakan pemekaran dari kabupaten bengkalis dibentuk pada tanggal 19 desember 2008. Dasar hukum berdirinya kabupaten

kepulauan Meranti adalah undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 januari 2009.

Tuntutan pemekaran kabuapten kepulauan meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kewedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 juli 2005 dibentuklah badan perjuangan pembentukan kabuapten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan dalam keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten bengkalis nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 juni 1999 tentang persetujuan terhadap pemekaran wilayah kabupaten bengkalis, surat bupati bengkalis Nomor 135/TP/876 Tanggal 17 juni 1999, perihal dukungan terhadap pembentukan kabuapeten kepulauan meranti, keputusan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a Tanggal 9 juni 2008 perihal dukungan terhadap pembentukan kabuapten kepulauan Meranti. Surat gubernur provinsi Riau nomor 100/PH/21.16.a tanggal 9 juni 2008 perihal dukungan terhadap pembentukan kabupaten kepulauan meranti surat gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 september 2008 perihal rekomendasi pembentukan kabupaten kepulauan meranti dan keputusan gubernur provinsi Riau Nomor 1396/IX/2008 tanggal 19 september 2008 tentang persetujuan pemerintah provinsi Riau terhadap pembentuka kabupaten kepulauan Meranti. Berdasarkan hal tersebut pemerintah telah melakukan pengkajian secara

mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 Desember 2008 pemerintah memutuskan dan menetapkan terbentuk kabupaten kepulauan meranti di provinsi Riau.

### C. Gambaran umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah kabupaten dilingkungan Propinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti terletak antara  $01^{\circ}39'33''$  -  $01^{\circ}25'08''$  LU dan  $102^{\circ}10'29''$  -  $103^{\circ}16'43''$  BT, dengan luas wilayah  $3.707,84 \text{ KM}^2$  dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- \* Sebelah Utara : Berbatasan dengan selat malaka dan Malaysia
- \* Sebelah Barat : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- \* Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- \* Sebelah Selatan : Berbatas dengan Selat Pinang dan Kab. Karimun

Sedangkan secara administrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 7 Kecamatan dan 73 Desa. Lokasi Kabupaten Kepulauan Meranti yang cukup strategis yang berbatasan langsung dengan selat malaka dan malaysia menyebabkan daerah ini semakin cepat berkembang terutama di sektor insdustri jasa dan perdagangan.

Perkembangannya yang cepat menyebabkan Kepulauan Meranti menarik bagi orang-orang luar daerah sehingga banyak pendatang masuk ke Kepulauan Meranti dan mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang makin besar. Pada periode 2000 – 2010 laju pertumbuhan penduduk rata-rata 0,60 % per tahun. Hal

tersebut dapat mengakibatkan makin kompleksnya permasalahan yang timbul, diantaranya masalah konflik sosial dan kebutuhan prasarana dan sarana yang meningkat. Dibidang ketenagakerjaan juga timbul masalah pengangguran yang disebabkan tenaga kerja yang bertambah, sementara daya tampung lapangan kerja baik sektor industri maupun jasa relatif terbatas. Angka pengangguran di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2001 sebesar 8,60 % dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 8,77 %.

Semakin berkembangnya Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah kawasan niaga maka semakin tinggi pula tuntutan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan warga kota terhadap pelayanan penyediaan prasarana dasar wilayah maupun pelayanan perijinan terus berkembang sesuai dengan tingkat hidup warga kota baik dalam volume maupun ragamnya.

Pelayanan perijinan seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penataan ruang yang meliputi usaha-usaha pengawasan yang terdiri dari pelaporan, pemantauan, evaluasi dan penerbitan dan khusus untuk kabupaten/kota ditambah dengan perijinan. Dalam prakteknya di lapangan, mekanisme perijinan ditempatkan sebagai unsur terdepan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Perijinan menjadi hal yang sangat penting justru karena mekanisme ini merupakan tahap awal dari pengendalian pemanfaatan ruang. Bila mekanisme perijinan diselenggarakan dengan baik, maka penyimpangan pemanfaatan ruang akan dapat ditekan seminimal mungkin.

Selain sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang, perijinan juga dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya disuatu daerah. Bila pengurusan perijinan dapat ditempuh dengan mudah, cepat, murah dan mempunyai kepastian hukum, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi didaerah tersebut. Sebaliknya, bila pengurusan perijinan berbelit-belit, tumpang-tindih dan memakan waktu yang lama serta biaya mahal, maka investor justru akan menganggapnya sebagai penghambat. Oleh karena itu, mekanisme perijinan yang efektif dan efisien akan berperan besar dalam pengembangan kegiatan perekonomian daerah. Perijinan merupakan upaya untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum.

Perencanaan regional Propinsi Riau yang tidak terintegrasi sering menimbulkan friksi antar daerah-daerah yang berada diwilayah tersebut termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Kerjasama dalam bidang perencanaan terutama perencanaan Pekerjaan Umum perlu lebih ditingkatkan dengan daerah lainnya diantaranya Siak, Bengkalis, sehingga perencanaan yang dihasilkan bisa lebih terintegrasi.

Secara kelembagaan, eksistensi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penguatan karena secara eksplisit mengembang amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif . Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi bagaimana kondisi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini,

bagaimana kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dan bagaimana cara mencapai kondisi yang diinginkan dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana teknis menghadapi pekerjaan secara akumulatif makin bertambah.

Berangkat dari pemikiran tersebut, berikut ini digambarkan kondisi umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini:

#### **D. Kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum**

Jumlah aparat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2011 sebanyak 44 orang. Untuk mengetahui gambaran kompetensi aparat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka dapat diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan formal, golongan / Kepangkatan, pendidikan dan pelatihan serta diklat penjenjangan (struktural).

Disamping beberapa fakta diatas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dihadapkan pada kondisi belum tersedianya data base keciptakaryaan, kebinamargaan dan pengairan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan bahwa kabupaten Kepulauan Meranti masih berumur 3 (tiga) tahun.(Kabupaten termuda di Provinsi Riau)

Selain itu juga minimnya ketersediaan fasilitas gedung dan peralatan pendukung dalam pelaksanaan tugas ke PU-an menyebabkan terhambatnya dalam menyelesaikan tugas-tugas pembangunan daerah.

Oleh sebab itu sejalan dengan pembangunan daerah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti berharap kepada Pemerintah Daerah dan

Legislatif untuk member dukungan atas kelemahan dan keterbatasan diatas.

#### **E. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Meranti**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi . Visi dapat pula diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawah agar eksis, antisipatif, dan inovatif.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai institusi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan implementasi teknis pembangunan dan sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Salah satu langkah adalah perumusan visi organisasi agar setiap anggota di dalam organisasi tersebut dapat memahami arah dan tujuan organisasi yang ingin dicapai bersama. Disamping itu pernyataan visi dapat menciptakan kesadaran kolektif diantara seluruh anggota organisasi tentang pentingnya pencapaian kondisi ideal yang diinginkan dan dirumuskan secara bersama. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan organisasi sesuai dengan tuntutan paradigma baru pembangunan maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan visi adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Ke PU-an handal berhasil guna serta berwawasan Lingkungan menuju Kawasan Niaga yang Maju dan***

*Unggul.*“

Penjelasan makna visi tersebut diatas sebagai berikut :

Visi tersebut di atas adalah merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai suatu lembaga teknis pembangunan daerah yang mempunyai tugas dan fungsi guna mewujudkan Prasarana dan Sarana yang berhasil guna dengan memperhatikan atau menjaga lingkungan sekitarnya menuju kawasan Niaga yang maju dan unggul

#### 1. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan Misi, Misi Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepulauan Meranti mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi serta produk teknis apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum maka dirumuskan misi Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. mewujudkan Prasarana dan Sarana ke PU-an yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata dengan bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat serta melibatkan seluruh stakeholder.
2. Mewujudkan lingkungan yang nyaman dan aman dicapai melalui tersedianya prasarana dasar dengan terpenuhi kebutuhan masyarakat.

Penjelasan Misi adalah sebagai berikut :

- a. Misi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum adalah bagaimana memenuhi

kebutuhan masyarakat dari sisi sarana dan prasarana fisik secara adil dan merata dengan pelibatan seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder serta bagaimana menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang ada.

- b. Dengan terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana diharapkan agar dapat memperhatikan lingkungan yang nyaman dan aman sehingga sarana dan prasarana yang tersebut tidak mengganggu keberadaan lingkungan tapi justru saling mendukung antara sarana dan prasarana yang ada dengan lingkungan.
- Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Meranti.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Meranti terdiri :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat:
  - Sub Bagian Perencanaan dan Program
  - Sub bagian Administrasi Umum
  - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Ruang
  - Seksi Tata Kota
  - Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
  - Seksi Pengendalian Tata Ruang
4. Bidang Cipta Karya
  - Seksi Tata Bangunan
  - Seksi Sarana Lingkungan
  - Seksi Pemelihara Sarana Bangunan
5. Bidang Bina Marga
  - Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan
  - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan
  - Seksi Pembangunan Pemeliharaan Jembatan
6. Bidang Pengairan
  - Seksi Pembangunan Saran Pengairan
  - Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air
  - Seksi Pengendalian Sarana Pengairan
7. Bidang Pemadam Kebakaran
  - Seksi Operasional
  - Seksi Sarana dan Prasarana

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

**F. Uraian Tugas Pokok Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Meranti**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dibidang Pekerjaan Umum sesuai kebijakan Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan

Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan ,perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga
- Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- Pembinaan ,pengkoordinasian , pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bidang;
- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

- a) Sub bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi kerja, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang penyusunan

program, perencanaan dan Pelaporan.

- b) Sub bagian Keuangan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - c) Sub bagian administrasi umum mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi Umum dan kepegawaian.
2. Bidang Pengairan mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pengairan.
- Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pengairan;
  - Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
  - Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pengairan;
  - Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pengairan.
- a) Seksi Pembangunan Sarana Pengairan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pembangunan Sarana Pengairan.

- b) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- c) Seksi Pengendalian Sarana Pengairan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengendalian Sarana Pengairan.
3. Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis Bidang Bina Marga;
  - Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
  - Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Marga;
  - Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Marga.
- a) Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan.
- b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas

Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan.

- c) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.
- 2) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang.

Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis Bidang Tata Ruang;
- Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum ;
- Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Tata Ruang;
- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Tata Ruang.

- a) Seksi Tata Kota mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Tata Kota.
- b) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.

c) Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pengendalian Tata Ruang.

4. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
- Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
- Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Cipta Karya;
- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Cipta Karya.
  - Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Tata Bangunan.
  - Seksi Sarana Lingkungan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Sarana Lingkungan.
  - Seksi Pemeliharaan Sarana Bangunan mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk,

menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Pemeliharaan Sarana Bangunan.

5. Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran.

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- Penyusunan kebijakan teknis Bidang Pemadam Kebakaran;
- Penyelenggaraan Kebijakan administrasi umum;
- Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pemadam Kebakaran;
- Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Pemadam Kebakaran.
  - Seksi Operasional mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Operasional.
  - Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Sarana dan Prasarana.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Informan yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalu wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu. Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Strategi Dinas Pekerjaan Umum dalam mengatasi Abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

##### 1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana Strategi Dinas Pekerjaan Umum dalam mengatasi Abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Distriusi Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini :

**Tabel V.1 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	4	60%
2	Perempuan	2	40%
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian, 2020*

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4 orang dengan persentase 60%, dan informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase 40%. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan Informan dalam penelitian ini di dominasi oleh laki-laki.

## 2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Tidak sekolah	-	-
2	SD	-	-
3	SMP	-	-
4	SMA	-	-
5	D1-D3	-	-
6	D4-S1	4	60%
7	S2	2	40%
8	S3	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu sarjana sebanyak 4 orang atau 60%, dan tingkat pendidikan pascasarjana berjumlah 2 orang atau 40%. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa Informan paling banyak

adalah S1 yaitu sebanyak 4 orang.

### 3. Umur Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 5.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1.	21 – 30	1	20%
2.	31 – 40	2	30%
3.	41 – 50	3	50%
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Penelitian, 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 1 orang atau 20%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 2 orang atau 30%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 3 orang atau 50%,Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini

relative sudah dewasa yaitu 41-50 orang yang di jadikan informan sebanyak 3 orang atau 50% sudah berumur 41-50 tahun.

#### **B. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Penyusunan sebuah strategi harus menggunakan metode maupun teknik-teknik tertentu. Sehingga kebijaksanaan yang dihasilkan akan optimal. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan keahlian yang memadai guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Strickland (J. Winardi, 2003:106), strategi dalam suatu organisasi adalah tindakan-tindakan dan pendekatan-pendekatan organisasi yang diterapkan oleh pihak pimpinan guna mencapai kinerja keorganisasian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini secara tipikal strategi merupakan sebuah bauran yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan secara sadar dan yang ditujukan pada sasaran-sasaran tertentu serta tindakan-tindakan yang diperlukan guna menghadapi perkembangan-perkembangan yang tidak diantisipasi, dan arena tekanan-tekanan yang bersifat kompetitif yang dilancarkan. Definisi di atas menekankan bahwa strategi sebagai tindakan keorganisasian yang diterapkan pimpinan organisasi secara disengaja, terencana dan diarah untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dimensi menurut J. Winardi (2003: 113-114), yaitu berupa berbagai dimensi yang terdapat dalam strategi organisasi sebagai berikut:

### 1. Tujuan

Tujuan atau sasaran yang paling penting dan perlu di capai dalam suatu organisasi, serta tujuan dan sasaran yang menyatakan apa saja yang perlu dicapai dalam suatu organisasi dan kapan hasil-hasil harus dilaksanakan. Dari tujuan dan sasaran nilai, menyatakan ke arah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang menetapkan sifat organisasi, dan menetapkan target bagi setiap kesatuan keorganisasian.

### 2. Program

Tahapan pelaksanaan program yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam batasan yang digariskan. Program-program menspesifikasikan langkah demi langkah tahapan-tahapan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan utama. Mereka menyatakan bagaimana sasaran-sasaran dari tujuan utama akan tercapai di dalam batas-batas oleh kebijakan. Mereka juga menyatakan bahwa sumber-sumber daya diarahkan ke arah pencapaian tujuan dan dengan apa kemajuan program dapat diukur.

### 3. Kebijakan

Dalam kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan merupakan peraturan atau prosedur yang menggariskan batas-batas didalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran spesifik.

Untuk melihat Strategi Dinas Pekerjaan Umum dalam mengatasi Abrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

### **1. Tujuan**

Tujuan atau sasaran yang paling penting dan perlu di capai dalam suatu organisasi, serta tujuan dan sasaran yang menyatakan apa saja yang perlu dicapai dalam suatu organisasi dan kapan hasil-hasil harus dilaksanakan. Dari tujuan dan sasaran nilai, menyatakan ke arah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang menetapkan sifat organisasi, dan menetapkan target bagi setiap kesatuan keorganisasian. ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

#### **a. Mencegah penyusutan Abrasi**

Mencegah penyusutan abrasi ini di artikan suatu proses untuk mengurangi lajunya proses pengikisan daratan yang diakibatkan oleh gelombang air laut dalam hal ini Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Kepulauan Meranti membuat beberapa program penanggulangan abrasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan meranti khususnya di kecamatan rangsang ,ini merupakan salah satu indikator penting strategi dalam upaya menanggulangi abrasi yang terjadi Sesuai dengan hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti hari Senin,2 Februa 2020 pukul 10.00 WIB, beliau mengatakan :

*“kami selaku pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ,kami telah membuat beberapa program dalam menanggulangi abrasi ini, kita ketahui bahwa abrasi yang parah terjadi di kecamatan ransang seperti dengan membuat batu penahan gelombang menurut kami ,ini cukup efektif untuk mengurangi percepatan abrasi yang terjadi di kecamatan ransang ini namun program ini baru hanya ada di beberapa titik lokasi yang terjadi belum seluruhnya ada di setiap bibir pantai di kabupaten kepulauan meranti “*

Dengan di buatnya batu penahan gelombang yang ada di kecamatan ransang akan membuat laju percepatan abrasi yang terjadi berkurang,yang mana di ketahui kecamatan ransang Kabupaten Kepulauan meranti ini salah satu daerah yang mengalami dampak abrasi yang cukup parah, sesuai dengan hasil wawancara dengan pak andi selaku warga yang ada di kecamatan Ransang pada tanggal 4 Februari 2020 , mengatakan :

*“iya benar Dinas Pekerjaan Umum telah membuat beberapa Batu Penahan gelombang ,ini lumayan meredam lajunya gelombang air laut yang dapat mengakibatkan abrasi di daerah ini, namun saya lihat sebenarnya harus ada program lain selain di buatkan batu penahan gelombang saja, seperti penanaman hutan bakau juga harus di lakukan dan saat ini program itu belum ada “*

Sesuai dengan hasil wawancara di atas kita ketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum telah membuat program Batu Penahan gelombang di sekitaran pesisir pantai yang mengalami abrasi karena terkikis oleh gelombang air laut, dalam hal ini program ini cukup efektif untuk meredam lajunya gelombang air laut namun program ini di akui belum merata di lakukan.

Berdasarkan Hasil observasi peneliti dilapangan melihat bahwa program yang di buat oleh Dinas Pekerjaan Umum telah terlaksana dengan adanya batu penahan gelombang yang di buat leh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kepulauan Meranti ini cukup efektif namun program ini belum sepenuhnya merata.

b. Melindungi Sumber Daya alam

Melindungi sumber Daya Alam ini di artikan sebagai sebuah upaya untuk menjaga serta memelihara Sumber daya alam yang ada khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan penelitian yang dilakukan terkait dengan abrasi ,melindungi Sumber daya alam merupakan salah satu Indikator penting dalam mengurangi abrasi yang terjadi tepatnya di Kecamatan rangsang , dalam hal ini berkaitan peneltian diatas Sumber daya alam yang di maksud salah satunya hutan bakau, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 02 february 2020 , mengatakan :

*“berkaitan dengan Melindungi Sumber Daya Alam itu di luar kewenangan kami,untuk hal itu masuk dalam kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan , selaku Dinas Pekerjaan umum kewenangan kami hanya dalam pembangunan infrastrukturnya saja seperti pembangunan Batu Penahan gelombang kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup berkaitan dengan Hutan mangrove ini, memang perlu adanya perlindungan karena ini salah satu langkah untuk mengurangi lajunya abrasi yang terjadi”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa berkaitan dengan melindungi sumber daya alam khususnya hutan bakau yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti ini diluar dari kewenangan Dinas Pekerjaan Umum , dan berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan kepada pak andi selaku warga di Kecamatan rangsang pada tanggal 4 Februari 2020 mengatakan :

*“ iya memang benar salah satu upaya agar tidak terjadi abrasi ni kita harus menjaga kelestarian SDA seperti hutan bakau, tapi untuk di daerah kami hutan bakau saat ini sudah rusak dan sampai saat ini belum ada tindakan lanjutan terkait dengan penanaman hutan bakau lagi kami harap pihak pemerintah harus cepat dan tanggap dalam menyelesaikan masalah ini”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa masyarakat sekitar juga mengharapkan pihak pemerintah agar dapat kembali membuat program terkait dengan penanaman hutan mangrove di sekitaran pesisir yang mengalami abrasi . berdasarkan Hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan indikator memelihara Sumber daya alam, memang benar bahwa Dinas Pekerjaan Umum tidak memiliki kewenangan terkait dengan hal ini mereka mengatakan bahwa untuk penanaman hutan mangrove ini menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan , dan hasil pemantauan bahwa belum ada program terkait hal itu.

c. Menjaga Lahan dan Tempat tinggal masyarakat Sekitar Pantai

Menjaga lahan dan tempat tinggal masyarakat sekitar pesisir pantai ini di artikan sebagai upaya pengawasan dan perlindungan yang dilakukan untuk menghindari dampak dari abrasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya di Kecamatan Rangsang, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 2 Februari 2020 , menyebutkan :

*“Program yang kami jalankan ini seperti pembuatan batu penahan gelombang ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga lahan dan tempat tinggal masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, dengan adanya batu penahan gelombang ini, percepatan laju abrasi berkurang kemudian dengan program lanjut dari Dinas lain juga bertujuan agar lahan masyarakat yang di pesisir aman dari dampak abrasi yang kita ketahui abrasi yang terjadi di kepulauan meranti ini cukup laju dengan percepatan setahun sepanjang 15 meter”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti terkait dengan indikator menjaga lahan dan tempat tinggal masyarakat pesisir pantai diketahui bahwa upaya yang mereka lakukan itu seperti membuat batu penahan gelombang dan itu cukup efektif untuk sedikit meredam laju dari abrasi itu sendiri, kemudian sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar pesisir pantai di kecamatan rangsang ini pada tanggal 04 Februari 2020 diketahui :

*“kami warga yang tinggal di sekitar pesisir pantai sangat berharap pihak pemerintah kabupaten Kepulauan meranti dapat memperhatikan daerah kami yang saat ini mengalami abrasi dan beberapa lahan masyarakat terkikis karena abrasi saat ini yang kami ketahui pihak pemerintah telah membuat batu penahan gelombang namun kami penanganannya lebih karena ini berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat pesisir”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas diketahui bahwa masyarakat mengharapkan upaya lebih yang dilakukan pemerintah daerah setempat melalui kebijakan kebijakan yang dapat menjaga kelangsungan hidup masyarakat setempat di pesisir pantai mereka mengkhawatirkan dampak abrasi yang terus terjadi, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan bahwa

saat ini upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui dinas Pekerja Umum Kabupaten Kepulauan Meranti baru membuat batu penahan gelombang dan belum ada kebijakan lain terkait dengan penanganan abrasi yang terjadi seperti penanaman hutan mangrove di sekitaran pesisir pantai.

## 2. Program

Tahapan pelaksanaan program yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam batasan yang digariskan. Program-program menspesifikasikan langkah demi langkah tahapan-tahapan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan utama. Mereka menyatakan bagaimana sasaran-sasaran dari tujuan utama akan tercapai di dalam batas-batas oleh kebijakan. Mereka juga menyatakan bahwa sumber-sumber daya diarahkan ke arah pencapaian tujuan dan dengan apa kemajuan program dapat diukur. ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indikator di atas, yaitu :

### a. Membangun Turap

Berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti terkait dengan penanggulangan bencana abrasi yang terjadi di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ini, melalui Dinas Pekerjaan Umum diharapkan dapat menyelesaikan masalah abrasi dengan salah satunya membangun Turap, Turap adalah Dinding Vertical yang relatif tipis yang berfungsi untuk menahan tanah ataupun menahan masuknya air kedalam lubang galian, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 2 Februari 2020, menyebutkan :

*“Iya memang benar Turap juga salah satu jawaban untuk mengurangi dampak dari abrasi yang terjadi saat ini di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya di Kecamatan Rangsang ini, namun pada tahap ini kami baru mengerjakan program pembuatan batu Bronjong ini hampir mirip juga fungsinya dengan Turap namun sedikit berbeda, dengan Keterbatasan anggaran yang ada kami belum bisa melakukan pembangunan Turap ini, ini membutuhkan anggaran yang cukup besar, ketika anggaran kita cukup pasti kami akan melakukan pembangunan Turap ini selain Batu Bronjong atau Batu penahan gelombang yang telah kami kerjakan “*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabuapten Kepulauan Meranti mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada program pembangunan Turap, seperti yang kita ketahui bahwa Turap juga salah satu bentuk cara dalam menanggulagi bencana abrasi ini . kemudian sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar pesisir pantai di kecamatan rangsang ini pada tanggal 04 Februari 2020 diketahui :

*“iya benar, belum ada pembangunan turap sampai saat ini di daerah kami, Dinas PU baru membangun batu bronjong atau kita kenal batu penahan gelombang, kami sangat mengharapkan sekali kepada pemerintah setempat untuk memperhatikan lebih lanjut masalah abrasi di kampung kami ini, agar masyarakat yang tinggal di pesisir pantai bisa aman dan kelangsungan hidupnya tidak terganggu oleh bencana abrasi ini”*

Dapat kita ketahui dari hasil wawancara di atas bahwa masyarakat sangat berharap pemerintah kabupaten Kampar untuk lebih memperhatikan masalah abrasi yang terjadi di kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti ini, mereka berharap ada program program seperti pembanguna turap yang hingga saat ini belum terealisasikan .berdasarkan Hasil Observasi Peneliti di lapangan

melihat bahwa memang benar belum ada satu pun program pembangunan Turap yang ada di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, saat ini baru pembangunan batu bronjong yang dilakukan yang mana kita ketahui bahwa Turap juga salah satu cara dalam menanggulangi abrasi.

b. Membangun Batu Penahan Gelombang

Batu Penahan Gelombang atau yang sering kita dengar Batu Bronjong ini adalah anyaman kawat baja yang dilapisi dengan seng atau galvanis, anyaman baja ini membentuk sebuah kotak atau balok. bagian dalamnya diisi dengan batu-batu berukuran besar untuk mencegah abrasi. program pembangunan batu penahan gelombang ini salah satu dari beberapa cara untuk menanggulangi bencana abrasi yang terjadi di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 2 Februari 2020, menyebutkan :

*“Iya berbeda halnya dengan Turap yang sebelumnya kita bahas tadi, untuk batu penahan gelombang atau yang kita kenal batu bronjong ini sudah kami lakukan, setelah melakukan beberapa kajian dan pemantauan kami melakukan pembangunan batu bronjong ini di sekitaran pesisir pantai tepatnya di daerah desa Tanjung Medang di Kecamatan Rangsang, kenapa disana karena kami merasa di daerah situ mengalami dampak dari abrasi yang sudah dapat dikatakan parah, dengan melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam menanggulangi abrasi ini kami selaku dinas PU, jika memang program ini berjalan dengan baik dalam menanggulangi bencana abrasi kami akan membangun lebih banyak pembangunan batu penahan gelombang lagi”*

Berdasarkan Hasil wawancara diatas kita ketahui bahwa pembangunan batu penahan gelombang atau kita kenal sebagai batu bronjong telah di lakukan sebagian oleh Dinas pekerjaa Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat sekitar pesisir pantai di kecamatan rangsang ini pada tanggal 04 Februari 2020 diketahui :

*“benar bahwa untuk pembangunan batu bronjong telah di lakukan oleh Dinas PU untuk yang di wilayah Desa Teluk Merdang ,setidaknya ini cukup mengurangi laju gelombang air laut di daratan , namun pembangunan ini saya rasa belum merata di lakukan untuk wilayah pesisir lainnya di kecamatan rangsang ini, kami mengharapkan agar pembangunan ini dapat merata di wilayah yang terkena abrasi baik itu dalam kondisi parah maupun masih skala kecil abrasi yang terjadi “*

Sesuai dengan Hasil wawancara di atas kita bisa ketahui bahwa pembangunan untuk batu penahan gelombang telah di lakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti . Berdasarkan Hasil Observasi yang di lakukan oleh peneliti di lapangan melihat bahwa batu penahan gelombang telah di bangun di beberapa pesisir pantai di Kecamatan Rangsang ,namun pembangunan ini belum merata masih ada beberapa desa yang juga terkena abrasi namun belum ada pembangunan Batu Penahan Gelombang.

#### c. Penanaman Hutan Mangrove

Penanaman Hutan Mangrove ini merupakan salah satu bentuk dari penanggulangan bencana Abrasi, Hutan mangrove ini berfungsi untuk mengurangi lajunya dan besarnya gelombang air laut yang akan sampai ke pesisir

dengan berkurangnya jalu dan besar gelombang maka akan mengurangi terkikisnya daratan yang di akibatkan oleh air laut, dengan hal ini kita akan mengetahui apakah pemerintah Kabupaten Kepulauan meranti melakukan program penanaman hutan mangrove di pesisir pantai. berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 2 Februari 2020 , menyebutkan :

*“terkait dengan penanaman hutan mangrove ini bukanlah kebijakan dari kami sebagai Dinas Pekerjaan umum, untuk masalah hutan mangrove bisa kita dapat informasi lebih lanjut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti itu kebijakan mereka terkait dengan penanaman hutan mangrove ini, kami selaku Dinas Pekerjaan Umum hanya membuat kontruksi terkait dalam penanggulangan abrasi ini seperti pembangunan Turap yang kemudian pembangunan Batu Penahan gelombang.”*

Dapat kita ketahui bahwa untuk penanaman hutan mangrove ini bukan lah kebijakan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti , Dinas tersebut hanya membuat kontruksi pembangunan seperti Turap dan Juga pembangunan batu Penahan gelombang, untuk informasi lebih lanjut kita lihat hasil wawancara dengan masyarakat sekitar pesisir pantai di kecamatan rangsang ini pada tanggal 04 Februari 2020 diketahui :

*“untuk penanaman hutan mangrove memang benar belum ada sama sekali di lakukan di daerah sini , kami juga tidak mengetahui apakah Dinas terkait akan melakukan program penanaman hutan mangrove ini atau tidak, hutan mangrove yang ada saat ini bukan hasil dari program Dinas Lingkungan Hidup ini mangrove liar yang tumbuh , itu pun mulai tumbuh karena setelah di*

*bangun batu penahan gelombang, padahal mangrove ini saya rasa juga punya fungsi yang besar untuk menanggulangi masalah abrasi ini”*

Berdasarkan wawancara dia atas kita ketahui bahwa untuk program penanaman hutan mangrove ini bukan kebijakan dari Dinas Pekerja Umum kabupaten Kepulauan Meranti, Dinas tersebut hanya membuat atau menyediakan kontruksi untuk pembangunan fisik seperti pembangunan turap dan juga pembangunan batu penahan gelombang. Berdasarkan hasil Observasi yang di lakukan oleh peneliti di lapangan melihat belum ada program penanaman hutan mangrove ini yang di lakukan oleh Dinas terkait dan hutan mangrove yang ada ini adalah mangrove yang tumbuh secara liar dari hasil keterangan warga mereka juga mengatakan mangrove ini tumbuh di saat sudah adanya pembangunan batu penahan gelombang yang sebelum ada batu penahan gelombang ini , mangrove di daerah ini tidak ada.

### **3. Kebijakan**

Dalam kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan merupakan peraturan atau prosedur yang menggariskan batas-batas didalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran spesifik.pada indikator ini kita akan menget

Diketahui kebijakan apa saja yang telah dilakukan dalam menanggulangi bencana abrasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti. ini maka peneliti menguraikan dari beberapa sub indicator di atas , yaitu :

a. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat

Berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti berkaitan dengan masalah penanggulangan bencana abrasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal ini pada sub indikator tentang Meningkatkan Pemahaman masyarakat di artikan sebagai sebuah upaya pemerintah untuk memberikan pemahaman terkait dengan menjaga alam sekitar dengan tidak merusak alam khususnya seperti tanaman tanaman mangrove untuk tidak di rusak dan juga pemahaman terkait dengan bahaya dari bencana yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya, karena tanpa pemahaman yang baik oleh warga setempat maka program yang di jalankan dalam upaya penanggulangan bencana abrasi ini tidak akan maksimal hasilnya. berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 2 Februari 2020 , menyebutkan :

*“pastinya kami telah memberikan sosialisasi sebelumnya terkait dengan masalah abrasi ini, hal ini sangat penting tanpa ada pemahaman yang baik oleh masyarakat terkait dengan Dampak dari abrasi itu sendiri dan cara penanggulangannya maka program program yang kami jalan dan Dinas terkait lainnya jalankan tidak akan maksimal , dengan memberikan pemahaman ini secara otomatis kami mendorong masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan dan bekerja sama dalam menanggulangi masalah abrasi sembari kami juga menjalankan program program kami untuk menanggulangi bencana abrasi yang terjadi ini”*

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa upaya memberikan pemahaman masyarakat terkait dengan masalah abrasi ini telah dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya warga di Kecamatan Rangsang

Kabupaten Kepulauan Meranti. hasil wawancara dengan masyarakat sekitar pesisir pantai di kecamatan rangsang ini pada tanggal 04 Februari 2020 diketahui :

*“Sebelumnya saya juga mendengar kalau ada sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup masalah abrasi ini namun untuk saya sendiri belum pernah mengikuti sosialisasi atau penyuluhan itu, ini bukan artinya saya tidak mau mengikuti acara tersebut memang saya tidak dapat informasinya kapan dan dimana sosialisasi tersebut, berarti sosialisasi yang di berikan ini belum merata untuk warga yang tinggal di pesisir.”*

Dapat kita ketahui bahwa Pemerintah melalui Dinas terkait telah melakukan beberapa sosialisasi yang di berikan kepada warga yang tinggal di pesisir pantai khususnya di Kecamatan Rangsang, dan Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti di lapangan melihat bahwa Sosialisasi yang di berikan tidak lah merata dilakukan ada beberapa warga yang tidak mendapatkan informasi tersebut padahal informasi tersebut sangat penting untuk pengetahuan dan pemahaman masyarakat.

b. Meningkatkan Koordinasi antar sektor

Berkaitan dengan permasalahan yang di angkat peneliti terkait dengan penanggulangan bencana abrasi pada indikator ini koordinasi antar sektor sangat di perlukan karena permasalahan abrasi ini sangat kompleks memerlukan kerja sama antar instansi terkait seperti halnya Dinas pekerjaan Umum membuat kontruksi Pembanguna Fisik seperti Turap dan batu Penaham gelombang dan dalam hal SDA dibutuhkan Kebijakan dari Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan terkait dengan Penanaman dan Pemeliharaan Hutan mangrove yang punya peran tidak kalah penting dalam menyelesaikan masalah abrasi di

Kabupaten Kepulauan Meranti. . berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 2 Februari 2020 , menyebutkan :

*“Benar bahwa dalam menyelesaikan masalah abrasi ini kita harus terus saling berkoordinasi antar Dinas Terkait, seperti Koordinasi dengan DLH terkait dengan Penanaman dan pemeliharaan mangrove karena mereka memiliki kebijakan dalam hal ini, semua ini di lakukan untuk bersama sama menyelesaikan masalah Abrasi , karena abrasi ini sangat memerlukan perhatian khusus baik untuk Pemda setempat maupun Pemerintah Provinsi .”*

Koordinasi sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah abrasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti , hal ini di tujukan untuk secara bersama sama melalui kewenangan dan kebijakan yang di miliki masing-masing instansi agar dapat menyelesaikan permasalahan abrasi. hasil wawancara dengan masyarakat sekitar pesisir pantai di kecamatan rangsang ini pada tanggal 04 Februari 2020 diketahui :

*“Untuk koordinasi kami tidak mengetahui bagaimana koordinasi antar sektor terkait itu, kami Cuma mengharapkan untuk semua instansi terkait agar dapat kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan abrasi yang terjadi di daerah kami”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas kita ketahui bahwa koordinasi antar sektor terkait dalam menyelesaikan masalah abrasi ini masih terus terjalin demi kepentingan bersama untuk secara bersama menyelesaikan masalah penanggulangan Bencana abrasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan Hasil Observasi dilapangan peneliti melihat bahwa koordinasi

memang telah dilakukan antar Instansi terkait namun hasil dari koodinasi tersebut belum terlihat seperti untuk permasalahan penanaman hutan mangrove sampai saat ini belum terlaksana.

c. Menyusun Perangkat hukum yang efektif

Banyak penyebab dari terjadinya kerusakan Sumber daya alam, berkaitan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti terkait dengan terjadinya abrasi, salah satu penyebabnya warga yang tidak menjaga lingkungan dan merusak lingkungan, seperti merusak tanaman mangrove yang mana mempunyai peran penting di wilayah pesisir, dengan adanya Hukum yang jelas dan tegas di harapkan bisa meminimalisir terjadinya kerusakan alam khususnya mangrove yang dapat mempercepat terjadinya abrasi. berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 2 Februari 2020 , menyebutkan :

*“Jelas ya, untuk hukum terkait dengan pelestarian lingkungan ini yang saya ketahui kami mengacu ada Perda Provinsi Riau no 8 tahun 2014 tentang pengelolaan dan penataan hukum lingkungan hidup dalam aturan itu jelas bagi yang merusak lingkungan pada pasal 58 terkait dengan sanksi akan dipana maksimal 3 tahun, dan ada juga ada dendanya, namun saya harapkan dengan kondisi seperti ini abrasi yang tiap tahunnya makin melebar terjadi di Kabupaten kepulauan meranti agar sadar untuk bersama menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar kita”*

Dasar Hukum memang haruslah ketat dan kuat untuk menjerat siapa saja yang melakukan perusakan lingkungan, karena kerusakan lingkungan ini akan memberikan dampak negatif yang besar jika tidak cepat di tanggulangi hasil

wawancara dengan masyarakat sekitar pesisir pantai di kecamatan rangsang ini pada tanggal 04 Februari 2020 diketahui :

*“saya tidak mengetahui secara jelas ya aturan seperti apa yang mengatur tentang pelanggaran dalam lingkungan ini, sebelumnya belum di sosialisasikan secara jelas kepada kami,Cuma kami pastinya mengaharapkan hukum terkait dengan lingkungan ini harus lah berat biar sebanding dengan dampak yang terjadi ,kami mengaharapkan keadilan harus di junjung tinggi ,apalagi terkait abrasi ini jika hal ini terjadi karena ada yang melakukan perusakan lingkungan kami harap agar dapat di tindak seadilnya”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas kita ketahui bahwa hukum yang mengatur terkait dengan lingkungan ini sudah di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau no 8 tahun 2014, dalam perda ini tergambar jelas sangki dari pelanggaran yang terjadi, berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan melihat bahwa terkait dengan hukum yang mengatur telah berjalan.

Berdasarkan Hasil Penelitian diatas, Peneliti menyimpulkan bahwa terkait dengan Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti ini kita ketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum telah melakukan beberapa program seperti membuat batu penahan gelombang namun dalam hal ini masih di nilai kurang maksimal yang membuat permasalahan abrasi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti belum terselesaikan seperti masih belum meratanya pembangunan batu penaham gelombang di beberapa pesisir pantai yang mengalami abrasi, kemudian belum adanya program pembuatan turap.

### **C. Faktor-faktor penghambat dalam Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti**

Dalam pelaksanaan Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, yakni :

1. Dengan anggaran yang terbatas yang di miliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga Dinas Pekerjaan Umum tersebut belum bisa menyelesaikan serta melanjutkan pembangunan turap dan batu penahan gelombang di beberapa lokasi yang mengalami abrasi seperti di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, Jika Pembangunan dilakukan secara merata untuk semua pesisir pantai di Kecamatan Rangsang maka abrasi akan dapat di atasi, seperti yang kita ketahui bahwa Batu Penahan gelombang dan Turap adalah salah satu bentuk untuk menggurangi abrasi.
2. Belum adanya hasil dari Koordinasi Antar sektor terkait antara Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan Penanaman dan Pelestarian Hutan mangrove yang ada di sekitaran pesisir pantai di Kecamatan Rangsang, bahwasannya Hutan Mangrove juga salah satu bentuk upaya untuk menanggulangi Abrasi yang terjadi ,dengan adanya Mangrove akan meredam laju dan besarnya gelombang air laut yang akan menuju pesisir pantai.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori dalam penelitian ini, yakni teori pembinaan dapat disimpulkan :

1. Pada indikator Tujuan dapat kita ketahui indikator ini berkaitan dengan beberapa Upaya pencegahan terjadinya abrasi berdasarkan hasil penelitian ini belum baik karena upaya tersebut belum maksimal dilakukan seperti belum adanya pembangunan turap, dan penanaman mangrove
2. Untuk Indikator Program ada beberapa penghambat untuk pelaksanaannya seperti keterbatasan anggaran sehingga pembangunan Turap belum terlaksana untuk menanggulangi Bencana Abrasi ini
3. Pada Indikator Kebijakan berkaitan dengan koordinasi yang terjadi belum menemui hasil seperti program penanaman mangrove yang merupakan kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup belum terlaksana

## B. Saran

Adapun saran penulis berikan sebagai masukan mengenai Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mengatasi Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu :

1. Disarankan untuk Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti agar dapat dengan cepat melanjutkan Pembangunan Batu penahan gelombang serta pembangunan Turap secara merata di daerah-daerah yang mengalami abrasi seperti di Desa Tanjung Medang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Seperti yang kita ketahui bahwa dua pembangunan tersebut mempunyai peran penting dalam menanggulangi abrasi yang terjadi.
2. Disarankan Kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti untuk lebih meningkatkan Koordinasi antar sektor terkait agar menghasilkan program-program lanjutan untuk menanggulangi abrasi secara bersama seperti koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan program penanaman dan pelestarian hutan mangrove di pesisir pantai di Kecamatan Rangsang karena hutan mangrove mempunyai peran penting dalam menanggulangi abrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S . (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awang dan Mendra Wijaya. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru. Alaf Riau
- Dermawan Wibisono (2006). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Erlangga
- J . Winardi. 2003 (Dwi Dian Kusuma). *Enterpreneur dan Preneurshisp*, Jakarta. Prenada Media.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck (1998). *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga
- L.L. Bernard , Siahaan 2009 (Ardhan Surya Wahyudi). *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam
- Mardalis 2010. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Meleong, L. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Mulyanto 2007. *Pengembangan dan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi*. Region, Vol. 2, No. 1
- Mulyanto 2007 (Ardhan Surya wahyudi). *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ndraha, Taliziduhu, 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_, 2003. *kybernology (Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Napitupulu, A Paiman, 2007. *Seri Ilmu Pemerintahan-Pelayanan Publik & Costumer Satisfaction*. Bandung: PT Alumn
- Rahman, Hidayat. 2009. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soekanto, Soeryono, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo

- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- \_\_\_\_\_. 2007. *Ilmu Pemerintahan*, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju
- \_\_\_\_\_, dan Andi Azikin. 2008. *Perbandingan Pemerintahan*, Bandung, PT. Refika Aditama
- \_\_\_\_\_, 2011. *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT. Perca
- \_\_\_\_\_, 2013. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### **Dokumentasi**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  
Peraturan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 34 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2021.